

# **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MELALUI PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT**

(Studi di TPST Mulyoagung Bersatu di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang)

## **SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**RESTHU CAHYANING ARIANI  
NIM. 145030101111132**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
MALANG  
2018**

## MOTTO

Dan barangsiapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (Al-'Ankabut 29:6)

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul : Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Program Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat

Disusun Oleh : Resthu Cahyaning Ariani

NIM : 145030101111132

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi : -

Malang, 28 Juni 2018

**Komisi Pembimbing**

**Ketua Komisi Pembimbing**



**Niken Lastiti V.A., S.AP, M.AP**  
**NIP. 19810210 200501 2 002**

**Anggota Komisi Pembimbing**



**Ike Arni Noventi, S.AP, M.AP**  
**NIP. 201309861009 2 001**

### PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi yang berjudul **“Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Program Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat”** tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70)

Malang, 06 Juli 2018

Yang membuat pernyataan



**Resthu Cahyaning Ariani**  
**NIM. 14503010111132**

## TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 12 Juli 2018

Jam : 09.00 - 10.00 WIB

Skripsi atas nama : Resthu Cahyaning Ariani

Judul : Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Program Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Studi di TPST Mulyoagung Bersatu di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang)

Dan dinyatakan lulus  
MAJELIS PENGUJI

Ketua,



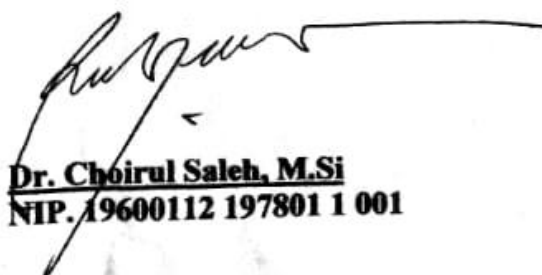
**Niken Lastiti V.A, S.AP, M.AP**  
NIP. 19810210 2005 01 2 002

Anggota,



**Ike Arni Noventi, S.AP, M.AP**  
NIP. 201309861009 2 001

Anggota,



**Dr. Choirul Saleh, M.Si**  
NIP. 19600112 197801 1 001

Anggota,



**Nana Abdul Aziz, S.AP, M.AP**  
NIP. 19840713 201504 1 004

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, atas kehendak dan pertolongan Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis dalam setiap langkah pengerjaan skripsi ini. Saya persembahkan skripsi ini kepada keluarga besar penulis, khususnya kepada kedua orang tua tercinta Bapak Santoso dan Mamak Asdariah yang telah bekerja keras dalam membiayai kuliah saya dan mendoakan yang terbaik untuk kesuksesan saya hingga sampai saat ini, juga kepada Ibu saya Hernawati yang selalu mendoakan yang terbaik untuk saya. Dan juga Bude Sri yang telah bekerja keras, menghidupi, mengajarkan, mendoakan dan memberikan yang terbaik untuk kesuksesan saya.

Resthu Cahyaning Ariani, 2018. **Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Program Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat**. Skripsi. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Komisi Pembimbing: Niken Lastiti V.A., S.AP, M.AP dan Ike Arni Noventi, S.AP, M.AP. 121 halaman + xviii

---

## RINGKASAN

Dalam peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah, tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang skala kawasan. Pembangunan TPST-3R (*Reduce, Reuse, & Recycle*) Mulyoagung Bersatu merupakan suatu upaya pengendalian dan pengelolaan sampah secara terpadu oleh pemerintah dan masyarakat desa Mulyoagung, Dau, Kab.Malang demi terwujudnya kualitas hidup yang bersih, sehat, dan nyaman. Serta TPST ini ditujukan untuk menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya pemberdayaan masyarakat di TPST Mulyoagung Bersatu, untuk mengetahui peran dari *Stakeholders* serta mengetahui indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakatnya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berada di Kabupaten Malang, dengan pemilihan lokasi di Desa Mulyoagung. Sumber data primer diperoleh dari beberapa wawancara dari informan yang berkaitan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tema tersebut. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan instrumen penelitiannya adalah peneliti sendiri dan beberapa alat penunjang seperti pedoman wawancara, dan alat bantu lainnya.

Hasil dari pemberdayaan masyarakat desa melalui program pengelolaan sampah berbasis masyarakat ini memberikan dampak yang positif bagi masyarakat Desa Mulyoagung, karena sesuai dengan tujuannya yaitu menanggulangi permasalahan sampah dan memberikan lapangan pekerjaan bagi warga setempat. Dengan adanya TPST Mulyoagung Bersatu, permasalahan sampah yang terjadi di Desa Mulyoagung dapat diatasi serta dapat membuat masyarakat setempat berdaya dengan hasil kerja mereka di TPST Mulyoagung Bersatu.

**Kata Kunci: Pemberdayaan, Masyarakat Desa, Pengelolaan Sampah**

Resthu Cahyaning Ariani, 2018. **Community Empowerment Through Community-Based Waste Management Program**. Thesis. Science Department of Public Administration, Faculty of Administration Science, Brawijaya University. Advisor Lecturer: Niken Lastiti V.A., S.AP, M.AP dan Ike Arni Noventi, S.AP, M.AP. 121 pages + xviii

---



Resthu Cahyaning Ariani, 2018. **Community Empowerment Through Community-Based Waste Management Program**. Thesis. Science Department of Public Administration, Faculty of Administration Science, Brawijaya University. Advisor Lecturer: Niken Lastiti V.A., S.AP, M.AP dan Ike Arni Noventi, S.AP, M.AP. 121 pages + xviii

---

## SUMMARY

In the regulation of Malang District Number 10 of 2012 on waste management, waste processing place with the principle of 3R (reduce, reuse, recycle) called TPS 3R is the place for the implementation of collection, sorting, re-use of the region scale. The development of TPST-3R (Reduce, Reuse, & Recycle) Mulyoagung Bersatu is an effort to control and integrated waste management by government and society of Mulyoagung village, Dau, Malang District for the realization of clean, healthy, and comfortable life quality. As well as TPST is intended to become employment for local communities. The purpose of this research is to know the effort of community empowerment in TPST Mulyoagung Bersatu, to know the role of Stakeholders and to know the indicator of success of society empowerment.

The type of this research is descriptive research with qualitative approach residing in Malang District, with location selection in Mulyoagung Village. Primary data sources were obtained from interviews from related informants, while secondary data were obtained from documents relating to the theme. Techniques of collecting data through interviews, observation, and documentation. While the research instrument is the researcher himself and some supporting tools such as interview guides, and other aids.

The result of community empowerment through community-based waste management program has a positive impact for the people of Mulyoagung Village, because it is in line with the objective of tackling the garbage problem and providing employment for the local people. With TPST Mulyoagung Bersatu, the garbage problems that occurred in Mulyoagung Village can be overcome and can make local people powerless with their work at TPST Mulyoagung Bersatu.

**Keywords: Empowerment, Village Communities, Waste Management**



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur peneliti panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah dilimpahkan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul :*“Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Program Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat”*.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Skripsi ini dapat terselesaikan dengan adanya bantuan dari berbagai pihak yang berupa petunjuk, bimbingan, pengarahan, dukungan moril, maupun fasilitas kepada peneliti. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati peneliti menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Drs. Andy Fefta, MDA., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
3. Ibu Dr. Fadillah Amin, M.AP., Ph. D. selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
4. Ibu Niken Lastiti V.A., S.AP, M.AP selaku Ketua Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Ike Arni Noventi, S.AP., M.AP selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.

6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Ilmu Administrasi Jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya atas bantuan dan kerjasama yang telah diberikan. Informasi dan dukungan unutup skripsi ini.
8. Pengelola dan seluruh pekerja Tempat Pengelolaaan Sampah Terpadu (TPST) Mulyoagung Bersatu yang telah memberikan sumber serta informasi yang mendukung untuk penelitian saya.
9. Kepala dan seluruh pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo memberikan yang telah sumber serta informasi yang mendukung untuk penelitian saya.
10. Kepala Desa Klatakan dalam memberikan informasi yang mendukung terselesaikannya skripsi ini .
11. Orang tua saya, Ayah saya Santoso, serta Mamak kandung saya Asdariah yang telah bekerja keras dan memberikan doa tiada henti hingga saya dapat menyelesaikan kuliah hingga selesai dan ibu Hernawati selaku ibu saya atas segala doa dan kasih sayangnya.
12. Untuk Bude Sri yang telah memberikan kasih saying serta doa tiada henti dan membantu menyelesaikan kuliah saya hingga sekarang.
13. Terima kasih untuk adik-adik saya, Resta, Rifqi dan Rafiq yang telah memberikan dukungan, semangat dan do'a selama masa kuliah hingga selesai. Dan untuk sepupu-sepupu saya yang di Malang, mbak Nena, mbak Fany, Mas Dimas yang telah menyemangati skripsi saya dan juga sepupu saya yang di Kediri, mbak Adis, mas Afen, mas Dino, mbak Diva.

14. Terimakasih untuk Erwin yang telah memberikan semangat, bantuan, dukungan dan do'a yang tiada hentinya hingga saya telah menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih telah berbagi keluh kesah bersama.
15. Terima kasih untuk sahabat saya di Kediri yang tidak hentinya memberikan dukungan dan saran Esti Anisa Pamungkas dan Sapriia Shinta Ike Widagdo
16. Terimakasih untuk teman-teman saya Arinda Agustin, Ananda Putri Mahardika, Erna Ratna Sari, Arinta Qurrota A'yunin, Setyana Dewi Sesanti, Nainin Laras, Defita Rosa, Devita Rahmadani, Normalita Fajrin, Della Putri serta Layli Qonita yang telah memberikan dukungan dan saran. Terima kasih telah menemani saya berjuang sampai saat ini.
17. Terimakasih untuk Keluarga Besar Sanggar Seni Mahasiswa (SSM) Fakultas Ilmu Administrasi Brawijaya telah menjadi rumah kedua, memberikan banyak pembelajaran dan memberikan pengalaman sehingga perkuliahan di FIA memiliki cerita tersendiri.
18. Terimakasih untuk kakak dan adik SSM FIA Mbak Ulfa, Mas Afif, Mbak Rery, Mbak Riska, Mas Agum, Mas Gita, Mbak Nikita, Mas Khafid, Priska, Farizkya, Anggi, Ulfa Novit, Herlina, Yoga, dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih telah menjadi keluarga, sahabat dan penyemangat hingga saya telah menyelesaikan perkuliahan ini.
19. Terima kasih untuk semua teman-teman Ilmu Administrasi Publik 2014, banyak hal yang sudah kita lalui bersama. Suka dan Duka. Semoga kesuksesan selalu bersama kita.

Demi kesempurnaan skripsi ini saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan

mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang.

**Malang, 1 Juli 2018**

**Penulis**



**DAFTAR ISI**

**MOTTO .....ii**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....iii**

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI..... iv**

**PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI ..... v**

**HALAM PERSEMBAHAN ..... vi**

**RINGKASAN ..... vii**

**SUMMARY ..... viii**

**KATA PENGANTAR..... ix**

**DAFTAR ISI..... xii**

**DAFTAR TABEL ..... xvii**

**DAFTAR GAMBAR..... xviii**

**BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang ..... 1

1.2 Rumusan Masalah..... 12

1.3 Tujuan Penelitian ..... 12

1.4 Kontribusi Penelitian ..... 13

1.5 Sistematika Penulisan ..... 14

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1 Administrasi Pembangunan ..... 17

2.2 Hakikat Pemberdayaan Masyarakat..... 21

    2.2.1 Definisi Pemberdayaan ..... 21

    2.2.2 Proses Pemberdayaan ..... 22

    2.2.3 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat ..... 23

    2.2.4 Strategi Pemberdayaan Masyarakat ..... 25



2.2.5 Upaya Pemberdayaan Masyarakat .....	26
2.2.6 Hambatan Pemberdayaan Masyarakat .....	28
2.3 Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat.....	29
2.3.1 Pengertian, Jenis, dan Sumber Sampah .....	29
2.3.2 Pengertian Pengelolaan Sampah .....	32
2.3.3 Dasar Kebijakan.....	33
2.3.4 Aktor yang Terlibat.....	38
2.3.5 Indikator Keberhasilan.....	40

**BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Jenis Penelitian.....	42
3.2 Fokus Penelitian.....	43
3.3 Lokasi Penelitian.....	44
3.4 Sumber Data.....	45
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.6 Instrumen Penelitian .....	48
3.7 Metode dan Analisis Data.....	49
3.8 Keabsahan Data .....	54

**BAB I V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Gambaran Umum Desa Mulyoagung .....	56
4.1.1 Keadaan Geografis dan Topografi Desa .....	56
4.1.2 Demografi .....	58
4.1.3 Sejarah Tokoh Pemimpin Desa Mulyoagung .....	59
4.2 Gambaran Umum Tempat Pembuangan Sampah Terpadu	
Mulyoagung .....	60
4.2.1 Latar Belakang Berdirinya TPST Mulyoagung Bersatu .....	60
4.2.2 Visi dan Misi.....	63
4.2.3 Tujuan .....	63



4.2.4 Struktur Organisasi .....	64
4.3 Penyajian Data .....	65
4.3.1 Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Program Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat .....	65
a. Bantuan dan Modal sebagai Modal Usaha.....	66
b. Pembangunan Prasarana sebagai Pendukung Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat .....	68
c. Penyediaan Sarana untuk Memperlancar Pemasaran Hasil Produksi Dan Jasa Masyarakat.....	72
d. Pelatihan Bagi Aparat dan Masyarakat .....	74
e. Penguatan Kelembagaan.....	77
4.3.2 Peran <i>Stakeholder</i> yang Terlibat.....	82
4.3.3 Hasil Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Program Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat.....	88
4.4 Analisis Data.....	95
4.4.1 Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Program Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat .....	96
a. Bantuan dan Modal sebagai Modal Usaha.....	98
b. Pembangunan Prasarana sebagai Pendukung Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat .....	99
c. Penyediaan Sarana untuk Memperlancar Pemasaran Hasil Produksi Dan Jasa Masyarakat.....	100
d. Pelatihan Bagi Aparat dan Masyarakat .....	101
e. Penguatan Kelembagaan.....	102
4.4.2 Peran <i>Stakeholder</i> yang Terlibat.....	103
4.4.3 Hasil Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Program Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat.....	110

**BAB V PENUTUP**

5.1 Kesimpulan .....	113
5.2 Saran .....	116

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR LAMPIRAN**





**DAFTAR TABEL**

No	Judul	Halaman
1	Tabel sampah di beberapa Provinsi di Indonesia Tahun 2000-2006.....	3
2	Rincian Luas Desa Mulyoagung.....	57
3	Jumlah Penduduk Desa Mulyoagung.....	58
4	Landasan Hukum Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Melalui TPST Mulyoagung Bersatu.....	79
5	Bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Desa.....	80
6	Bantuan Pihak Swasta.....	85
7	Tiga Aktor dalam Pemberdayaan Masyarakat.....	103

**DAFTAR GAMBAR**

No	Judul	Halaman
1	Gambar Grafik Pertambahan Volume Timbulan Sampah Plastik (m <sup>3</sup> /Tahun) .....	6
2	Penumpukan Sampah di Kabupaten Malang .....	7
3	Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif .....	50
4	Peta Desa Mulyoagung .....	56
5	Struktur Desa Mulyoagung .....	60
6	Lokasi TPST Mulyoagung Bersatu .....	62
7	Struktur Organisasi Kelompok Swadaya Masyarakat TPST Mulyoagung Bersatu .....	64
8	Proses Pengelolaan Sampah .....	73
9	Proses Pemilahan sampah .....	74
10	Pelatihan Pengelolaan Sampah di TPST Mulyoagung Bersatu .....	76
11	Kunjungan dari Earth Hour Malang .....	94



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan hidup menyediakan kebutuhan-kebutuhan hidup manusia dan sebaliknya, kehidupan manusia sangat tergantung pada tersedianya sumber daya alam yang memadai dalam lingkungan hidup. Lingkungan yang sehat adalah lingkungan yang bersih, lingkungan yang bersih harus terbebas dari sampah karena sampah merupakan salah satu penyebab lingkungan menjadi kumuh dan kotor. Lingkungan hidup merupakan tempat dimana manusia menyelenggarakan seluruh aktivitasnya, sehingga seluruh komponen di dalam lingkungan hidup memiliki peran penting bagi manusia. Mengingat pentingnya keberadaan lingkungan bagi manusia, maka sudah seharusnya manusia memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup agar terhindar dari pencemaran lingkungan yang dapat menyebabkan kemerosotan kualitas lingkungan.

Menjaga kebersihan lingkungan pada era global ini telah menjadi hal yang sangat sulit ditemukan, masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan dan tidak peduli pada keindahan lingkungan. Persoalan lingkungan telah lama menjadi topik dunia ketika manusia mulai merasakan dampaknya yang semakin



meluas yakni terlihat pada banyaknya bencana. Seperti berita yang dimuat dalam kompas.com, banjir yang terjadi di Jakarta tahun 2013 terbukti gara-gara sampah. Berikut adalah isi dari berita tersebut: Abdul Muhari, peneliti Indonesia pada Hazard and Risk Evaluation di International Research Institute of Disaster Science (IRIDeS), Tohoku University, mengobservasi dan melakukan simulasi untuk mengetahui penyebab banjir yang terjadi di Jakarta, 17 Januari 2013 lalu.

Pada tahun 2013, debit air di Kanal Banjir Barat, khususnya Manggarai dan Karet, sangat tinggi dibanding hujan pada tahun-tahun sebelumnya. Abdul mengatakan, hal tersebut perlu dipertanyakan. Sebabnya, curah hujan di Katulampa pada hari sebelum banjir Januari 2013 hanya 107 mm, jauh lebih rendah dibanding curah hujan saat banjir 2007 yang mencapai 409 mm. Hasil simulasi Abdul dan timnya mengungkap bahwa tingginya debit air yang mencapai 180 meter kubik per detik dan ketinggian air di Manggarai dan Karet disebabkan oleh sampah. Sampah menutup tiga dari empat pintu air di Karet. Efek terhalangnya tiga dari empat pintu air di Karet berpotensi menyebabkan peningkatan tinggi muka air di segmen Manggarai-Karet sampai 10 meter dari ketinggian yang seharusnya hanya enam meter jika empat pintu air tersebut bekerja sempurna.

Namun, hingga kini polemik ini masih menjadi mimpi buruk dan menjadi tugas besar untuk diselesaikan bersama. Salah satu masalah lingkungan yang sangat penting dan mendapat perhatian serius saat ini adalah sampah. Indonesia sendiri

merupakan negara penghasil sampah terbesar kedua di dunia, dengan menghasilkan sampah mencapai 175.000 ton sampah per hari (nationalgeographic.co.id).

Total jumlah sampah di beberapa provinsi di Indonesia cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun. Sebagai contoh, Tahun 2000 jumlah sampah di Jawa Barat adalah sekitar 10,00 juta ton dan meningkat sampai 11,13 juta ton di tahun 2007. (sumber: sampahmasyarakat.com). Di Pulau Bali, sampah yang dihasilkan sudah menyentuh angka 10.725 ton per hari. Sedangkan di Palembang, peningkatan jumlah sampah naik tajam dari 700 ton per hari menjadi 1.200 ton per hari. (sumber: geotimes.co.id).

Pulau Jawa adalah pulau terkecil diantara lima pulau besar di Indonesia tetapi menghasilkan sampah paling banyak. Jumlahnya sangat signifikan, bahkan hampir mencapai 21,2 juta ton per tahun. Ini berkorelasi dengan kepadatan penduduk di Pulau Jawa. Dengan penduduk yang mencapai sekitar hampir 160 juta manusia. (Wikipedia Ensiklopedia Bebas) Tabel 1 memperlihatkan jumlah sampah di beberapa provinsi di Jawa yang meningkat dari tahun 2000-2006:

**Tabel 1**

**Produksi Sampah di beberapa provinsi di Indonesia dari tahun 2000-2006**

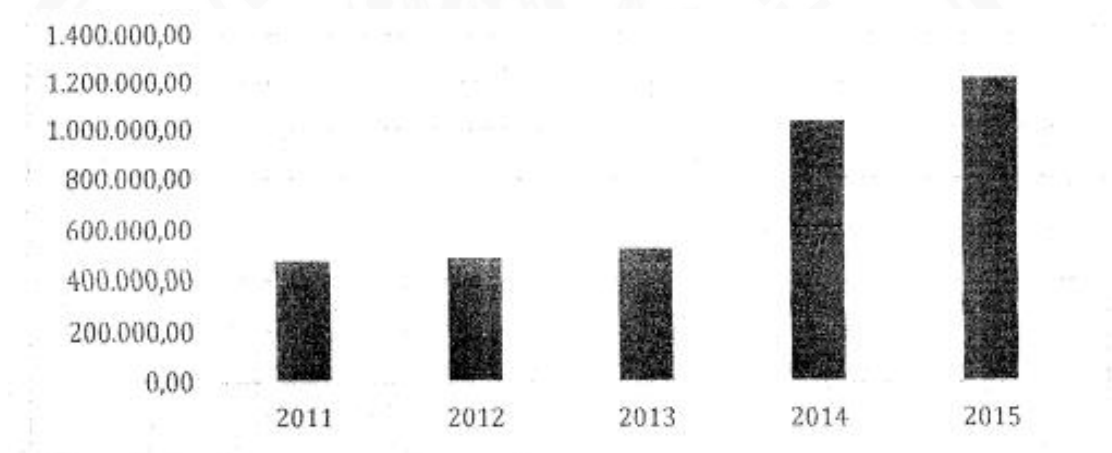
No	Provinsi	Produksi sampah (juta ton)			
		2000	2002	2004	2006

No	Provinsi	Produksi sampah (juta ton)			
		2000	2002	2004	2006
1	Jawa Barat	10,00	10,37	10,75	11,13
2	Jawa Timur	9,73	9,82	9,91	9,99
3	Jawa Tengah	8,74	8,82	8,89	8,96
4	Sumatra Utara	3,26	3,35	3,44	3,53
5	DKI Jakarta	2,34	2,38	2,42	2,45

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup (2008)

Provinsi di Indonesia dengan penghasil sampah terbanyak adalah Jawa Barat, diikuti oleh Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara dan DKI Jakarta. Empat dari lima provinsi tersebut berada di Pulau Jawa. Ini menjadikan Pulau Jawa sebagai pulau penghasil sampah terbesar di Indonesia (Kementrian Lingkungan Hidup, 2008). Sampah yang dihasilkan didominasi oleh sampah rumah tangga dan diantaranya adalah sampah makanan. Sampah rumah tangga memiliki presentase 44,5 % dari total sampah di Indonesia. Sampah yang dihasilkan mencapai 1,12 kg/kapita setiap harinya. Sampah makanan mendominasi 58% total sampah rumah tangga tersebut (Kementrian Lingkungan Hidup, 2008). Dalam UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang sudah dianggap sudah

tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Beberapa contoh dari sampah anorganik adalah plastik, botol kaleng bekas, limbah, pabrik atau asap motor, pecahan besi, pecahan kaca, pecahan tembaga dan ban bekas. Salah satu jenis sampah yang besar pengaruhnya adalah sampah plastik, apalagi dalam pencemaran tanah, hal ini disebabkan karena sampah plastik membutuhkan waktu minimal 20 tahun untuk terurai, bahkan sejenis botol plastik dan bahan-bahan plastik lainnya yang lebih tebal membutuhkan waktu 100 tahun bahkan lebih. (Sandi, 2017) Berikut skala pertambahan volume sampah plastik dapat dilihat pada gambar grafik dibawah ini:



Gambar 1. Grafik pertambahan Volume Timbulan Sampah Plastik ( $m^3$ /tahun) di beberapa kota besar di Indonesia

Sumber: Sekretariat Adipura, Kementerian Lingkungan Hidup, 2016

Kabupaten Malang merupakan salah satu daerah dengan persoalan sampah yang belum tuntas yang terjadi di Indonesia, didukung oleh berita yang dimuat dalam malangvoice.com: “Jumlah sampah di Kabupaten Malang sudah mencapai angka yang cukup fantastis. Dalam satu tahun, produksi sampah mencapai 400 ribu ton.



Bupati Kabupaten Malang menyebutkan, timbunan sampah ini bahkan bisa menyerupai bukit. Jumlah 400 ribu ton produksi sampah di Kabupaten Malang ini tidak semua bisa ditangani oleh Pemkab. Hanya sekitar 40 persen atau 160 ribu ton yang bisa diangkut ke TPA. Sisanya yang 60 persen itu perlu dipikirkan cara pengolahannya.



Gambar 2. Penumpukan sampah di Kabupaten Malang

*Sumber: www.malangtimes.com*

Salah satu daerah di Kabupaten Malang yang diangkat dalam penelitian ini adalah Desa Mulyoagung yang terletak di Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Desa yang menghasilkan sampah hingga 30meter kubik per hari ini sebelumnya terbiasa membiarkan sampahnya mengalir langsung ke Kali Brantas, hingga dikecam oleh pemerintah kabupaten setempat karena dinilai sebagai salah satu penyebab utama pencemaran kali Brantas.Pencemaran lingkungan pada daerah tersebut terjadi di Daerah Aliran Sungai Brantas akibat lokasi Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) yang berada di bibir sungai Brantas. Banyaknya masyarakat yang membuang

sampah di TPS yang berada pada tepi Sungai Brantas menyebabkan semakin banyaknya penumpukan sampah, sehingga ketika hujan turun seringkali sampah-sampah ikut terbuang di sungai. Kondisi tersebut tersebut tentunya menjadi salah satu permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat Mulyoagung.

Dalam peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah, tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang skala kawasan. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Dalam rangka mempersiapkan implementasi program Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycling (3R) Berbasis Masyarakat di Desa Mulyoagung, TPST yang dibuat ini difasilitasi oleh Pemerintah Desa Mulyoagung melalui perannya sebagai pendamping serta Pembina.. Ketentuan mengenai implementasi program Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycling (3R) Berbasis Masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mempersiapkan lokasi TPS 3R Berbasis Masyarakat dengan merelokasi TPS yang dahulu berada di tepi sungai Brantas ke suatu lahan milik Desa Mulyoagung, yang selanjutnya dikenal sebagai Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Mulyoagung Bersatu.

Pembangunan TPST-3R (Reduce, Reuse, & Recycle) Mulyoagung Bersatu merupakan suatu upaya pengendalian dan pengelolaan sampah secara terpadu oleh pemerintah dan masyarakat desa Mulyoagung, Dau, Kab.Malang demi terwujudnya kualitas hidup yang bersih, sehat, dan nyaman. Dengan adanya TPST Mulyoagung Bersatu di Desa Mulyoagung, seharusnya masyarakat Mulyoagung memiliki kesadaran dalam berupaya dan menanggulangi sampah yang ada di daerah tersebut. Kesadaran masyarakat yang kurang untuk membuang sampah pada tempatnya akan berakibat pada kurangnya partisipasi masyarakat untuk menjaga dan merawat lingkungan. Kurangnya partisipasi masyarakat untuk mengikuti kegiatan bersama membersihkan lingkungan membuat sampah-sampah yang ada belum ditangani dengan baik.

Dari permasalahan yang terjadi, terdapat salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan menggerakkan masyarakat untuk mengelola sampah bersama dengan membuat Tempat Pembuangan Sementara menjadi TPST Berbasis Masyarakat. Sehingga kegiatan ini melibatkan seluruh anggota masyarakat dan kerjasama antara masyarakat sekitar menjadi baik, dan masyarakat dapat diberdayakan dengan baik. Selain menjadi upaya pengelolaan dan pengendalian sampah, Tempat Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat ditujukan untuk menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat.

Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat sudah seharusnya diarahkan untuk membantu proses pengelolaan sampah berbasis masyarakat itu sendiri, caranya adalah dengan melakukan upaya pemberdayaan masyarakat. Pada dasarnya

pemberdayaan memang sudah menjadi salah satu pendekatan yang dilakukan pemerintah. Hal itu tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai martabat kemanusiaan”. Sedangkan makna dari pemberdayaan sendiri, Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan untuk atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menuju pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan. (Edi Suharto: 59-60)

Selanjutnya pemaknaan pemberdayaan masyarakat menurut Madkhan Ali (2007: 86) yang mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai berikut ini: “Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah bentuk partisipasi untuk membebaskan diri mereka sendiri dari ketergantungan mental maupun fisik. Partisipasi masyarakat menjadi satu elemen pokok dalam strategi pemberdayaan dan pembangunan masyarakat, dengan alasan; pertama, partisipasi masyarakat merupakan satu perangkat ampuh untuk memobilisasi sumber daya lokal, mengorganisir serta

membuka tenaga, kearifan, dan kreativitas masyarakat. Kedua, partisipasi masyarakat juga membantu upaya identifikasi dini terhadap kebutuhan masyarakat”.

Pemberdayaan masyarakat sudah seharusnya berupaya untuk meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia (SDM) terutama terkait dengan pola pikir dan perilaku dari masyarakat sendiri sehingga akan mampu untuk memperbaiki taraf hidupnya menjadi lebih baik dan berkualitas. Kemudian pemberdayaan juga bisa diarahkan pada pemberian akses pemodal dan serta bantuan pemberian wadah pekerjaan guna mengaktualisasi kemampuannya. Secara khusus pemerintah juga diwajibkan untuk melakukan pemberdayaan. Hal tersebut terjadi mengingat pentingnya peran dari pemberdayaan itu sendiri. Pemberdayaan akan berfungsi pada keberdayaan masyarakat, masyarakat yang awalnya tidak berdaya akan mampu untuk berdaya dan mandiri.

Pemanfaatan sampah belakangan ini sudah banyak dilakukan oleh berbagai kelompok warga yang dibantu oleh pemerintah agar sampah yang menjadi masalah masyarakat di tiap daerah dapat diminimalisir sehingga barang-barang yang tadinya tidak memiliki nilai menjadi barang yang bermanfaat dan bernilai jual bagi masyarakat. Sampah saja, namun juga untuk memberdayakan masyarakat agar peduli terhadap lingkungan. Pemberdayaan masyarakat ini dapat menangani penumpukan sampah sangat beragam, contohnya dengan adanya program pengelolaan sampah berbasis masyarakat ini, diharapkan menjadi upaya pengendalian dan penanggulangan sampah serta menjadi upaya pemberdayaan masyarakat setempat.

Program pemberdayaan melalui daur ulang sampah ini menjadi sangat penting dan strategis sebagai upaya pembangunan lingkungan berbasis masyarakat, yaitu mengupayakan peran serta atau partisipasi masyarakat. Langkah ini bukan hanya dilakukan untuk mengurangi penumpukan Upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan memberikan beberapa fasilitas-fasilitas atau wadah pemberdayaan. Fasilitas pemberdayaan tersebut merupakan strategi dalam rangka mencapai kegiatan pemberdayaan. Upaya pemberdayaan bisa diberikan fasilitas-fasilitas berupa pelatihan, pengembangan SDM dan untuk menambah ekonomi masyarakat bisa dilakukan pada aspek pemasaran. Dengan adanya TPST Mulyoagung Bersatu, pengelolaan Sampah yang Berbasis Masyarakat ini diharapkan menjadi solusi bagi permasalahan sampah yang ada di sekitar daerah tersebut dan bisa meningkatkan rasa kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar, serta pemberdayaan masyarakat yang dilakukan ini juga dapat berdampak baik bagi masyarakat desa Mulyoagung agar masyarakat di daerah sekitar Mulyoagung mendapatkan pekerjaan dan mampu memberikan partisipasi di desanya.

Permasalahan yang telah peneliti jelaskan diatas membuat peneliti tertarik dalam melakukan penelitian pemberdayaan masyarakat di Desa Mulyoagung dalam pengelolaan Sampah Berbasis 3R. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Program Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (studi kasus di TPST Mulyoagung Bersatu di Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau Kabupaten Malang)”**.

## 1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pemaparan yang telah peneliti paparkan sebelumnya, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Program Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di TPST Mulyoagung Bersatu?
2. Bagaimana peran dari *Stakeholders* yang terlibat dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Program Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di TPST Mulyoagung Bersatu?
3. Bagaimana indikator keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Program Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di TPST Mulyoagung Bersatu?

## 1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Program Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di TPST Mulyoagung Bersatu.
2. Untuk mengetahui peran dari *Stakeholders* yang terlibat dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Program Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di TPST Mulyoagung Bersatu.



3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan indikator keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Program Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di TPST Mulyoagung Bersatu.

#### **1.4 KONTRIBUSI PENELITIAN**

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi semua pihak, diantaranya:

1. Kontribusi Akademis

- a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dalam bidang studi administrasi publik, mengenai konsep program, dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

- b. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan peneliti sebagai sarana untuk memberikan ilmu dan bahan informasi dalam bidang studi administrasi publik mengenai administrasi publik, konsep program, dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Sehingga selanjutnya, peneliti lain setelah peneliti ini menjadi lebih baik.

2. Kontribusi Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan atau informasi bagi pemerintah terkait melaksanakan program kegiatan, khususnya

kebijakan dan program mengenai pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan masukan bagi masyarakat dan menentukan sikap serta merespon adanya program yang dilahirkan oleh pemerintah, khususnya program mengenai pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

### **1.5 SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Penulisan skripsi ini disajikan dalam lima bab. Masing-masing bab memberikan pokok bahasan yang saling terkait satu sama lain dan tersusun secara sistematis sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang yang mengemukakan tentang alasan yang melatar belakangi penelitian, rumusan masalah yang merupakan masalah yang timbul dan dicari jawabannya, tujuan penelitian yang menguraikan hasil apa yang ingin dicapai dalam penelitian dan manfaat penelitian yang merupakan pernyataan tentang kontribusi hasil penelitian secara spesifik yang semuanya berkaitan dengan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan menguraikan tinjauan pustaka yang dijadikan sebagai acuan dasar dalam penelitian yang berisi landasan teori dan pernyataan para ahli.

Terdapat beberapa teori yang berhubungan dengan topik penyusunan skripsi, antara lain yakni teori yang berkaitan dengan kajian pengertian administrasi publik, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini akan menguraikan tentang metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang meliputi: jenis penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian serta analisis data.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan menguraikan hasil penelitian yang meliputi penyajian data dan analisis data yang diperoleh selama penelitian dan merupakan jawaban dari pertanyaan dalam perumusan masalah dengan alternatif penyelesaiannya

### **BAB V: PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan yang didapatkan dari pembahasan dan hasil selama penelitian. Bab ini juga akan diuraikan saran-saran yang sesuai dengan kesimpulan guna melakukan perbaikan dimasa yang mendatang dan memberikan manfaat.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah di ambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (siagian, 2009:4). The liang gie (dalam pasalong, 2011:3) mendefenisikan administrasi adalah rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di dalam kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Pasalong (2011:3) administrasi adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efesien dan rasional. Selanjutnya ia menyatakan administrasi mempunyai dua dimensi yaitu dimensi karakteristik dan dimensi unsure-unsur. Dimensi karakteristik yang melekat pada administrasi yaitu efesien, efektif dan rasional sedangkan dimensi unsur-unsur administrasi yaitu:

- a. Adanya tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelum melaksanakan suatu pekerjaan
- b. Adanya kerjasama baik sekelompok orang atau lembaga pemerintah maupun lembaga swasta

- c. Adanya sarana yang digunakan oleh sekelompok atau lembaga dalam melaksanakan tujuan yang hendak dicapai.

Pembangunan menurut Siagian (2009:4) didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangkaian pembinaan bangsa (nation-building). Selanjutnya ia berpendapat paling sedikit tujuh ide pokok yang muncul dari definisi pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan, pembangunan dilakukan secara terencana baik dalam arti jangka panjang, jangka sedang, dan jangka pendek, rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan, pembangunan mengarah ke modernitas, modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan per definisi bersifat multi dimensional, semua hal yang disinggung di tujukan kepada usaha pembinaan bangsa. Selanjutnya Todaro (dalam Suharto, 2006:3) mengemukakan bahwa sedikitnya pembangunan harus memiliki tiga tujuan yang satu sama lain saling terkait yaitu:

- a. Meningkatkan ketersediaan dan memperluas distribusi barang kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan kepada seluruh anggota masyarakat.

- b. Menacapai kualitas hidup yang bukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan secara material, melainkan juga untuk mewujudkan kepercayaan diri dan kemandirian bangsa. Aspek ini meliputi peningkatan pendapatan, penyediaan lapangan kerja, pendidikan dan budaya serta nilai kemanusiaan.
- c. Memperluas kesempatan ekonomi dan sosial bagi individu dan bangsa melalui pembebasan dari perbudakan dan ketergantungan pada orang atau bangsa lain serta pembebasan dari kebodohan dan penderitaan. Dapat dipahami bahwa proses pembangunan dapat diupayakan kearah yang positif serta lebih maju dari sebelumnya. Dalam membangun tentunya tidak akan semudah membalikan telapak tangan. Perlu usaha-usaha secara sadar, pengorbanan dan proses yang memakan waktu serta harus dilalui dengan kerjasama semua pihak yang terlibat. Upaya-upaya sadar yang dikaitkan dengan negara untuk melakukan perbaikan dikenal dengan administrasi pembangunan.

Siagian (2009: 5) mendefenisikan administrasi pembangunan yaitu seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya. Mostopadidjaya dalam affudin (2010: 51) menyatakan bahwa administrasi pembangunan adalah ilmu dan seni tentang bagaimana



pembangunan suatu sistem administrasi yang mampu menyelenggarakan berbagai fungsi pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien. Dari pengertian administrasi pembangunan diatas dapat dipahami sangat penting untuk kemajuan suatu negara melalui usaha-usaha yang dilakukan pemerintah. Administrasi pembangunan mempunyai fungsi dalam perumusan kebijakan dan program-program pembangunan yang pelaksanaan dilakukan secara efektif untuk kesejahteraan rakyat. Afiffudin (2010: 64) fokus analisis administrasi pembangunan adalah proses pembangunan yang diselenggarakan oleh suatu bangsa dalam rangka pencapaian tujuan dan cita-cita negara atau bangsa tertentu, termasuk cara-cara ilmiah yang dipergunakan dalam pemecahan masalah, meghadapi tantangan, memanfaatkan peluang dan menyingkirkan ancaman. Disiplin ilmu administrasi pembangunan memiliki cirri-ciri yang membedakan dengan disiplin Ilmu-ilmu yang lain yaitu :

- a. Orientasi administrasi pembangunan lebih mengarah kepada usaha perubahan-perubahan keadaan yang dianggap lebih baik.
- b. Administrasi pembangunan melakukan perbaikan dan penyempurnaan administrasi dikaitkan dengan aspek perkembangan di bidang-bidang lain seperti ekonomi, sosial, politik dan lain-lain

Jika dimasukan administrasi pembangunan dalam konteks idea menurut Siagian maka dapat dipahami administrasi pembangunan adalah

usaha-usaha yang dilakukan oleh desa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan desa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya. Kegiatan pembangunan di desa dalam Jayaditana (2006:87) meliputi bidang ekonomi, sosial, fisik dan prasarana dan pemerintahan. Administrator adalah orang yang menduduki posisi puncak dalam suatu struktur. Jadi administrator pembangunan dapat diartikan secara sederhana yaitu orang yang menduduki posisi puncak dalam suatu struktur yang merumuskan kebijakan yang menjadi dasar dalam kegiatan pembangunan. Sesuai dengan penelitian ini maka kedudukan dan posisi puncak yang dimaksud adalah kepala desa.

## **2.2 HAKIKAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

### **2.2.1 DEFINISI PEMBERDAYAAN**

Menurut Suhendra (2006:74-75) pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamik, secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan semua potensi. Berbeda dengan pendapat Pranarka, Sumodiningrat (Sumodiningrat, 2000 dalam Ambar Teguh, 2004: 78-79) menyampaikan: pemberdayaan sebenarnya merupakan istilah yang khas Indonesia daripada Barat. Di barat istilah tersebut diterjemahkan sebagai *empowerment*, dan istilah itu benar tapi tidak tepat. Pemberdayaan yang kita maksud adalah memberi “daya” bukan “kekuasaan” daripada “pemberdayaan” itu sendiri. Barangkali istilah yang

paling tepat adalah “*energize*” atau katakan memberi “energi” pemberdayaan adalah pemberian energi agar yang bersangkutan mampu untuk bergerak secara mandiri.

### 2.2.2 PROSES PEMBERDAYAAN

Pranarka dan Vidhyandika (1996) menjelaskan bahwa “proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya. Kecenderungan pertama tersebut dapat disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. Sedangkan kecenderungan kedua atau kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog”.

Proses yang dimaksud adalah proses dari masyarakat yang tidak sadar akan potensinya maupun tidak sadar dengan apa yang ada disekitarnya menjadi sadar dan mau merubah diri, sehingga apabila masyarakat yang telah melewati proses pemberdayaan, masyarakat tersebut adalah warga masyarakat yang berdaya. Sumardjo (1999) menyebutkan ciri-ciri warga masyarakat berdaya yaitu:

1. Mampu memahami diri dan potensinya, mampu merencanakan (mengantisipasi kondisi perubahan ke depan)
2. Mampu mengarahkan dirinya sendiri
3. Memiliki kekuatan untuk berunding
4. Memiliki *bargaining power* yang memadai dalam melakukan kerjasama yang saling menguntungkan, dan
5. Bertanggungjawab atas tindakannya

Slamet (2003) menjelaskan lebih rinci bahwa yang dimaksud dengan masyarakat berdaya adalah masyarakat yang tahu, mengerti, paha termotivasi, berkesempatan, memnfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, tahu berbagai elternatif, mampu mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi dan mampu bertindak sesuai dengan situasi. Proses pemberdayaan yang melahirkan masyarakat yang memiliki sifat seperti yang diharapkan harus dilakukan secara berkesinambungan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat secara bertanggungjawaban.

### **2.2.3 TUJUAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Menurut Widjaja (2003:169) pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya. Sehingga, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai tujuan maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil

yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Menurut Mardikanto (2014:202), terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat, yaitu:

d. Perbaikan kelembagaan (Better Institution)

Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.

e. Perbaikan usaha (Better Business)

Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibisnislitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.

f. Perbaikan pendapatan (Better Income)

Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.

g. Perbaiki lingkungan (Better Environment)

Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.

h. Perbaiki kehidupan (Better Living)

Pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga.

#### **2.2.4 STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Menurut Mardikanto dan Soebianto (2012: 167) menyatakan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan jelas dan harus dicapai. Oleh sebab itu, setiap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perlu dilandasi dengan strategi kerja tertentu demi keberhasilannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya menurut Mardikanto dan Soerbianto (2012: 167) menyatakan strategi diartikan dengan beberapa pendekatan, seperti:

- 1) Strategi sebagai suatu rencana, sebagai suatu rencana, strategi merupakan pedoman atau acuan yang dijadikan landasan pelaksanaan kegiatan, demi tercapainya tujuan-tujuan yang ditetapkan. Dalam hubungan ini, rumusan strategi senantiasa memperhatikan kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman yang dilakukan oleh (para) pesaingnya.

- 2) Strategi sebagai kegiatan, sebagai suatu kegiatan, strategi merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh setiap individu, organisasi atau perusahaan untuk memenangkan persaingan, demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau telah ditetapkan.
- 3) Strategi sebagai suatu instrumen, sebagai suatu instrumen, strategi merupakan alat yang digunakan oleh semua unsur pimpinan/perusahaan, terutama manajer puncak, sebagai pedoman sekaligus alat pengendali pelaksanaan kegiatan.

#### **2.2.5 UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Pemberdayaan yang dapat tumbuh dengan baik, diperlukan adanya dukungan dari berbagai pihak yang dapat menunjang dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat, oleh sebab itu diperlukan suatu upaya tertentu seperti yang dikemukakan oleh Sumodiningrat dalam Mashoed (2004: 40) yang menyatakan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat agar berpartisipasi dalam pembangunan adalah:

- a) Bantuan dana sebagai modal usaha.
- b) Pembangunan prasarana sebagai pendukung pengembangan sosial ekonomi rakyat.
- c) Penyediaan sarana untuk memperlancar pemasaran hasil produksi dan jasa masyarakat.
- d) Pelatihan bagi aparat dan masyarakat



e) Penguatan kelembagaan sosial ekonomi rakyat.

Upaya pemberdayaan bukan hanya dalam peningkatan pada bidang perekonomian saja, tetapi juga diarahkan kepada pengembangan kualitas sumber daya manusia, seperti usaha untuk meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah serta masyarakat dalam bentuk pelatihan. Menurut Kartasasmitha (1996:159) bahwa memberdayakan masyarakat harus dilaksanakan melalui tiga cara, yaitu:

- a) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat berkembang. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena kalau demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran atau potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.
- b) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat. Dalam hal ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain itu untuk menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut berbagai masukan (input) serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi semakin berdaya.



c) Memberdayakan mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu perlindungan dan pemihakan yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Dalam rangka ini, adanya peraaaturan perundangan yang jelas dan tegas melindungi golongan yang lemah sangat diperlukan. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi. Karena hal ini justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi tergantung pada berbagai program pemberian. Karena pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan harus dihasilkan atau usaha sendiri.

#### **2.2.6 HAMBATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Pelaksanaan pemberdayaan tidak akan lepas dengan hambatan dari pemberdayaan itu sendiri. Menurut Fahrudin (2009:18) tingkat kesadaran dan pengetahuan mengenai kegiatan untuk melakukan perubahan merupakan masalah utama dalam pemberdayaan. Pemberdayaan akan efektif apabila didukung dengan masyarakat yang memiliki keinginan untuk melakukan perubahan dan masyarakat yang mau untuk berpartisipasi didalamnya sehingga terjadi

kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Bhatnagar dalam Mardikanto dan Soebianto (2013:106) bahwa prinsip pemberdayaan antara lain:

- a. Minat dan kebutuhan, artinya pemberdayaan akan efektif jika selalu mengacu kepada minat dan kebutuhan masyarakat.
- b. Kerjasama dan partisipasi, artinya pemberdayaan hanya akan efektif jika mampu menggerakkan partisipasi masyarakat untuk selalu bekerjasama dalam melaksanakan program-program pemberdayaan yang telah dirancang.

Kesimpulan dari pendapat diatas bahwa Masyarakat atau Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor utama dalam pemberdayaan. Sehingga rendahnya partisipasi dan rendahnya keinginan untuk melakukan perubahan menjadi hambatan tersendiri bagi pelaksanaan upaya pemberdayaan.

## **2.3 PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT**

### **2.3.1 PENGERTIAN, JENIS DAN SUMBER SAMPAH**

Sampah pada dasarnya merupakan suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia maupun proses-proses alam yang tidak mempunyai nilai ekonomi, bahkan dapat mempunyai nilai ekonomi yang negatif karena dalam penanganannya baik untuk membuang atau membersihkannya memerlukan biaya yang cukup besar.

Sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga). Sementara didalam UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan sampah adalah sisa kegiatan sehari hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang kelingkungan. Sampah bisa berasal dari berbagai tempat, seperti : Sampah dari pemukiman penduduk pada suatu pemukiman biasanya sampah dihasilkan oleh suatu keluarga yang tinggal disuatu bangunan atau asrama. Jenis sampah yang dihasilkan biasanya cenderung organik, seperti sisa makanan atau sampah yang bersifat basah, kering, abu plastik dan lainnya.

Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, jenis sampah yang diatur adalah:

a. Sampah rumah tangga

Yaitu sampah yang berbentuk padat yang berasal dari sisa kegiatan sehari-hari di rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik dan dari proses alam yang berasal dari lingkungan rumah tangga.

Sampah ini bersumber dari rumah atau dari kompleks perumahan.

b. Sampah sejenis sampah rumah tangga

Yaitu sampah rumah tangga yang berasal bukan dari rumah tangga dan lingkungan rumah tangga melainkan berasal dari sumber lain seperti

pasar, pusat perdagangan, kantor, sekolah, rumah sakit, rumah makan, hotel, terminal, pelabuhan, industri, taman kota, dan lainnya.

c. Sampah spesifik

Yaitu sampah rumah tangga atau sampah sejenis rumah tangga yang karena sifat, konsentrasi, dan atau jumlahnya memerlukan penanganan khusus meliputi, sampah yang mengandung B3 (bahan berbahaya dan beracun seperti baterai bekas, bekas toner, dan sebagainya), sampah yang mengandung limbah B3 (sampah medis), sampah akibat bencana, puing bongkaran, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, sampah yang timbul secara periode (sampah hasil kerja bakti).

Membahas tentang sampah perlu diketahui pula sumber sampah dan penghasil sampah, dimana sumber sampah adalah asal timbunan sampah, sedangkan penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbunan sampah. Menurut Gilbert, dkk. (1996), sumber sampah adalah sebagai berikut:

1. Pemukiman penduduk
2. Tempat umum dan tempat perdagangan
3. Sarana layanan masyarakat milik pemerintah
4. Industri berat dan ringan
5. Pertanian

Jenis-jenis sampah dapat dilihat berdasarkan asalnya yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari

makhluk hidup dan sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati. Dilihat dari keadaan fisiknya dapat dikelompokkan pada sampah basah dan sampah kering. Sampah basah (garbage) merupakan golongan sampah dari sisa-sisa pengolahan atau sisa-sisa makanan dari rumah tangga seperti sayur mayur dan mempunyai sifat mudah membusuk, mengandung air dan menimbulkan bau.

### **2.3.2 PENGERTIAN PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS**

#### **MASYARAKAT**

Dalam modul pelatihan pengelolaan sampah berbasis masyarakat pada blog slideshare.net dijelaskan bahwa, Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (*Community Based Solid Waste Management= CBSWM*) adalah sistem penanganan sampah yang direncanakan, disusun, dioperasikan, dikelola dan dimiliki oleh masyarakat. Tujuannya adalah kemandirian masyarakat dalam mempertahankan kebersihan lingkungan melalui pengelolaan sampah yang ramah lingkungan.

Prinsip-prinsip CBSWM adalah:

- 1) Partisipasi Masyarakat
- 2) Kemandirian
- 3) Efisiensi
- 4) Perlindungan lingkungan
- 5) Keterpaduan

Dalam pengertian ini pemeran (penguasa, kekuatan) utama dalam pengelolaan sampah adalah masyarakat. Bukan pemerintah atau lembaga lainnya

seperti LSM dan lain – lain. Pemerintah dan lembaga lainnya hanyalah sebagai motivator dan fasilitator. Fungsi motivator adalah memberikan dorongan agar masyarakat siap memikirkan dan mencari jalan keluar terhadap persoalan sampah yang mereka hadapi. Tetapi jika masyarakat belum siap, maka fungsi pemerintah atau lembaga lain adalah menyiapkan terlebih dahulu. Misalnya dengan melakukan pelatihan, study banding dan memperlihatkan contoh – contoh program yang sukses dan lain – lain. Fungsi fasilitator adalah memfasilitasi masyarakat untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah secara baik dan berkesinambungan. Jika masyarakat mempunyai kelemahan dibidang teknik pemilahan dan pengomposan maka tugas fasilitator adalah memberikan kemampuan masyarakat dengan berbagai cara misalnya dengan memberikan pelatihan, begitu juga jika masyarakat lemah dalam hal pendanaan, maka tugas fasilitator adalah membantu mencari jalan keluar agar masyarakat mampu mendapat pendanaan yang dibutuhkan, tetapi harus dilakukan secara hati – hati jangan sampai membuat masyarakat tergantung.

### **2.3.3 DASAR KEBIJAKAN**

#### **1. UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan perlunya perubahan yang mendasar dalam pengelolaan sampah yang selama ini dijalankan. Sesuai dengan Pasal 19 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut, pengelolaan sampah

dibagi dalam dua kegiatan pokok, yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pasal 20 menguraikan tiga aktivitas utama dalam penyelenggaraan kegiatan pengurangan sampah, yaitu pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Ketiga kegiatan tersebut merupakan perwujudan dari prinsip pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan yang disebut 3R (*reduce, reuse, recycle*). Dalam Pasal 22 diuraikan lima aktivitas utama dalam penyelenggaraan kegiatan penanganan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

Kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut bermakna agar pada saatnya nanti seluruh lapisan masyarakat dapat terlayani dan seluruh sampah yang timbul dapat dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, dan diproses pada tempat pemrosesan akhir.

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, kebijakan pengelolaan sampah dimulai. Kebijakan pengelolaan sampah selama lebih dari tiga dekade hanya bertumpu pada pendekatan kumpul-angkut-buang (*end of pipe*) dengan mengandalkan keberadaan TPA, diubah dengan pendekatan *reduce at source* dan *resource recycle* melalui penerapan 3R. Oleh karena itu



seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Malang diharapkan mengubah pandangan dan memperlakukan sampah sebagai sumber daya alternative yang sejauh mungkin dimanfaatkan kembali, baik secara langsung, proses daur ulang, maupun proses lainnya. Lima tahap penanganan yaitu pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Malang secara bertahap dan terencana, serta didasarkan pada kebijakan dan strategi yang jelas. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memegang peran penting dalam melaksanakan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008. Sehubungan dengan itu, Peraturan Daerah ini berperan penting guna melindungi kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, menekan terjadinya kecelakaan dan bencana yang terkait dengan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah Kabupaten Malang.

## **2. UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa



pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perkehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perludilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah perununan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itusendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

### **3. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah dijelaskan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah. Pengelolaan adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, pendauran ulang, penggunaan ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

## 2.3.4 STAKEHOLDERS YANG TERLIBAT

### 1. DEFINISI STAKEHOLDER

*Stakeholder* merupakan istilah yang sudah sangat fenomenal. Menurut bahasa, *Stakeholder* terdiri dari dua kata yaitu *stake* dan *holder*. *Stake* berarti tongkat dan *holder* berarti pemegang. Maka *stakeholder* memiliki arti pemegang tongkat atau pemegang kuasa untuk megarahkan suatu rencana program, program atau kegiatan pembangunan. *Stakeholder* didefinisikan oleh Hertifah (2000: 29) sebagai “individu”, kelompok organisasi baik laki-laki atau perempuan yang memiliki kepentingan, terlibat atau dipengaruhi (positive atau negative) oleh suatu kegiatan program pembangunan. Pendapat tersebut dipertegas oleh Kuncoro (2005: 8) bahwasannya “*stakeholder* adalah semua individu, kelompok, dan organisasi yang mempunyai kepentingan pada kinerja organisasi, termasuk pemilik, karyawan, masyarakat umum dan lain sebagainya”. Pengertian *stakeholder* tersebut sesuai dengan pengertian stakeholder oleh para ahli yang lain diantaranya dikemukakan oleh Cobb dan Elder dalam Suwitri (2009: 5), aktor kebijakan adalah komunitas kebijakan yang terdiri pemerintah, sekelompok publik yang berpartisipasi di bawah inisiator atau pemimpin opini dengan tekanan media massa. *Stakeholder* didefinisikan sebagai perorangan, organisasi dan sejenisnya yang memiliki andil atau perhatian dalam bisnis atau industri (Hornby

dalam Iqbal, 2007: 90). Menurut Gonsalves dkk dalam Iqbal (2007: 90) mendeskripsikan *stakeholder* atas siapa yang memberi dampak dan/atau terkena dampak kebijakan, program, dan aktifitas pembangunan. *Stakeholder* tersebut dapat berupa laki-laki atau perempuan, komunitas, kelompok sosial ekonomi atau lembaga dalam berbagai dimensi pada setiap tingkat golongan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Aktor atau *stakeholder* merupakan setiap orang baik individu maupun kelompok yang memiliki kepentingan dan ikut terlibat dalam suatu program kegiatan pembangunan. Dengan penjelasan tersebut, kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat memerlukan aktor yang mendukung program pengelolaan sampah berbasis masyarakat, karena *stakeholder* yang terlibat akan memberikan dampak yang besar dan penting bagi kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Karena dengan adanya aktor kebijakan yang terdiri dari pemerintah atau kelompok organisasi, aktor tersebut otomatis menjadi fasilitator dan motivator dalam program kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat tersebut.

### 2.3.5 INDIKATOR KEBERHASILAN

Indikator keberhasilan dalam suatu pemberdayaan ditentukan oleh beberapa hal. Menurut Suharto (2006) mengemukakan indikator pemberdayaan adalah:

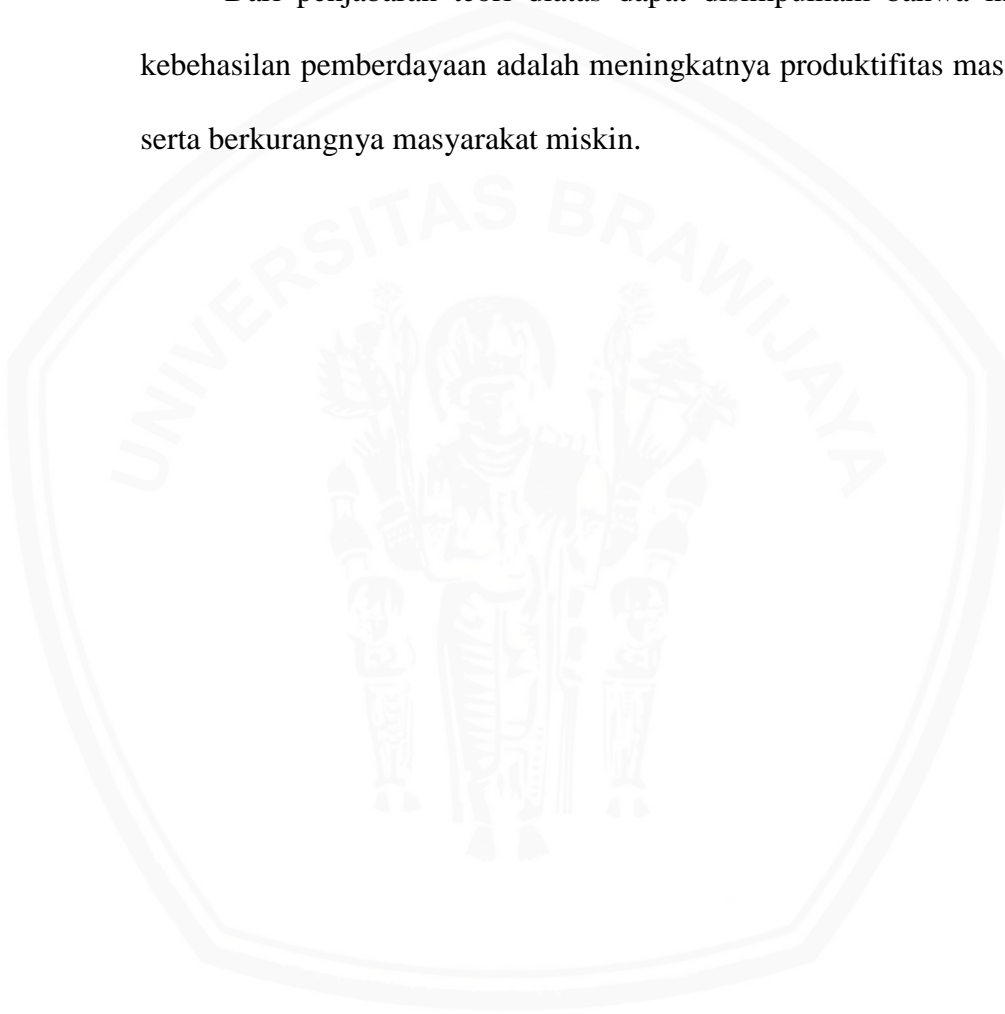
1. Kebebasan mobilitas
2. Kemampuan membeli komoditas kecil
3. Kemampuan membeli komoditas besar
4. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga
5. Kebebasan relative dari dominasi keluarga
6. Kesadaran hukun dan politik
7. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes
8. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga

Menurut Sumodiningrat (1999) indikator keberhasilan dalam program-program suatu pemberdayaan adalah:

- a. Berkurangnya jumlah penduduk miskin
- b. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin
- c. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya pningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya
- d. Meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan semakin berkembangnya usaha produktif anggota dari

kelompok, makin mudahnya permodalan kelompok, makin rapi sistem administrasi kelompok, serta semakin banyak interaksi dengan kelompok lain di masyarakat.

Dari penjabaran teori diatas dapat disimpulkan bahwa indicator keberhasilan pemberdayaan adalah meningkatnya produktifitas masyarakat serta berkurangnya masyarakat miskin.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Tujuan dari jenis penelitian ini adalah untuk menjelaskan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel yang timbul timbul dimasyarakat yang menjadi objek penelitian (Bungin, 2001: 44). Menurut Tan (dalam Silalahi 2009: 28) penelitian bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi, adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Berdasarkan dua pengertian yang telah disampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian dengan jenis penelitian dekriptif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk memuat gambaran terkait situasi atau kejadian di dalam masyarakat.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif juga disampaikan oleh Bogdan dan Taylor dalam Moeloeng (2012: 6), bahwa penelitian dengan pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Berdasarkan pengertian tentang penelitian melalui pendekatan kualitatif ini, maka dapat dipahami bahwa melalui pendekatan kualitatif peneliti dapat memahami suatu peristiwa atau fenomena melalui

prosedur penelitian dan dapat menyajikan data-data secara tertulis. Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif kualitatif dengan bertujuan untuk memberikan gambaran, mengungkapkan dan menjelaskan terkait proses pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat di TPST Mulyoagung Bersatu di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

### **3.2 FOKUS PENELITIAN**

Fokus penelitian merupakan pusat perhatian yang bermaksud untuk membatasi suatu permasalahan yang diteliti agar tidak terjadi kesalahan persepsi ketika mengkaji permasalahan yang ada. Penentuan fokus penelitian ini, selain menggunakan teori, peneliti juga menggunakan fakta empiris sebagai fokus dari penelitian ini. Menurut Moleong (2009:97) fokus pada dasarnya adalah masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah atau kepustakaan lainnya. Fokus penelitian merupakan tahap awal pelaksanaan penelitian, dengan demikian peneliti akan memperoleh gambaran secara umum tentang objek yang akan diteliti. Berdasarkan pada masalah penelitian dan tujuan penelitian, maka fokus dari penelitian ini adalah:

1. Upaya Pemberdayaan masyarakat desa melalui program pengelolaan sampah berbasis masyarakat di TPST Mulyoagung Bersatu. Upaya pemberdayaan masyarakat menurut Sumodiningrat dalam Mashoed (2004: 40):
  - a. Bantuan dana sebagai modal usaha



- b. Pembangunan prasarana sebagai pendukung pengembangan sosial ekonomi masyarakat
  - c. Penyediaan sarana untuk memperlancar pemasaran hasil produksi dan jasa masyarakat
  - d. Pelatihan bagi aparat dan masyarakat
  - e. Penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat
2. Peran dari *Stakeholders* yang terlibat dalam program pengelolaan sampah berbasis masyarakat di TPST Mulyoagung Bersatu.
  3. Hasil dari pemberdayaan masyarakat melalui program pengelolaan sampah berbasis masyarakat di TPST Mulyoagung Bersatu Menurut Sumodiningrat (1999) indikator keberhasilan dalam program-program suatu pemberdayaan adalah:
    - a. Berkurangnya jumlah penduduk miskin
    - b. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin
    - c. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya
    - d. Meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan semakin berkembangnya usaha produktif anggota dari kelompok, makin mudahnya

permodalan kelompok, makin rapi sistem administrasi kelompok, serta semakin banyak interaksi dengan kelompok lain di masyarakat.

### 3.3 LOKASI PENELITIAN

Moleong (2013:128) menjelaskan bahwa lokasi penelitian ialah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Penentuan lokasi penelitian, cara terbaik yang ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki dengan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan.

Berdasarkan lokasi penelitian ini peneliti nantinya akan memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan tema, masalah, serta fokus penelitian yang ditetapkan. Pemilihan lokasi penelitian ini adalah di TPST Mulyoagung Bersatu di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan dengan pertimbangan peneliti, bahwa dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di TPST Mulyoagung merupakan tempat pengelolaan sampah sebagai tempat pengelolaan percontohan dan menjadi pencetus TPS menjadi TPST dan telah sukses. Seperti dilansir pada web Earth Hour Malang, “TPST 3R Mulyoagung Bersatu telah menjadi percontohan TPST nasional dan telah dikunjungi dari beberapa negara, diantaranya Jerman, Jepang, Australia, dan Amerika Serikat. Dalam jangka panjang, TPST 3R Mulyoagung ingin mengembangkan TPST ini menjadi salah satu tujuan wisata edukasi bagi masyarakat umum.”

### 3.4 SUMBER DATA

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini menyangkut sumber-sumber penyedia informasi yang dapat mendukung informasi tentang hal-hal yang menjadi pusat perhatian peneliti. Yang dimaksud dengan sumber data adalah subyek darimana data dapat diperoleh, Arikunto (2002). adapun sumber data penelitian ini adalah:

#### 1. Data Primer

Sumber data primer yang diambil oleh peneliti yakni diperoleh secara langsung dari kelompok sasaran. Dilakukan dengan cara wawancara. Dalam hal ini, sumber data primer yang didapatkan oleh peneliti yaitu didapatkan langsung dari sumbernya (subyek penelitian). Dalam hal ini, sumber data primer yang akan diambil oleh peneliti yakni sebagai berikut:

- a. Pengelola TPST Mulyoagung Bersatu
- b. Kepala desa Mulyoagung
- c. Masyarakat desa Mulyoagung

#### 2. Data sekunder

Data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat, atau mendengarkan (Sarwono, 2006:210). Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung biasanya data itu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang lain diluar penelitian. Dalam penelitian ini data sekundernya adalah laporan-

laporan atau karya tulis ilmiah terkait pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat serta Literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, serta arsip-arsip TPST Mulyoagung Bersatu Kecamatan Dau dan Dinas Lingkungan Hidup yang terkait.

### **3.5 TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

Teknik pengumpulan data yang peneliti ambil yaitu adalah teknik wawancara mendalam, observasi, dan bahan dokumenter, sehingga pengumpulan data pada penelitian ini juga menggunakan ketiga teknik tersebut, yakni sebagai berikut:

#### **1. Wawancara**

Dalam hal ini, peneliti melakukan teknik wawancara dimana peneliti melakukan percakapan antara dua pihak, yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan terwawancara (yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara). Wawancara dilakukan secara lisan kepada informan untuk memperoleh data yang sebenarnya.

Informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pengelola TPST Mulyoagung Bersatu
- b. Kepala desa Mulyoagung
- c. Masyarakat desa Mulyoagung

#### **2. Observasi**

Observasi menurut Sugiyono (2015:310) yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan yang sistematis

terhadap gejala-gejala dan kegiatan yang berlangsung. Dengan melakukan pengamatan sesuai dengan tujuan atau apa yang ditelitinya kemudian dilakukan pencatatan atas pengamatan yang diperoleh.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi secara langsung yaitu dengan mendatangi dan mengamati lokasi penelitian yakni TPST Mulyoagung Bersatu di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Observasi yang dilakukan secara langsung adalah cara untuk memperlancar dan juga mempermudah penulis dalam pengumpulan data untuk penelitian.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2015:329)

### 3.6 INSTRUMEN PENELITIAN

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri (Sugiyono, 2015:222). Sedangkan menurut Arikunto (2006:136), Instrumen penelitian adalah alat fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Dalam penelitian ini instrumen atau alat yang digunakan adalah:

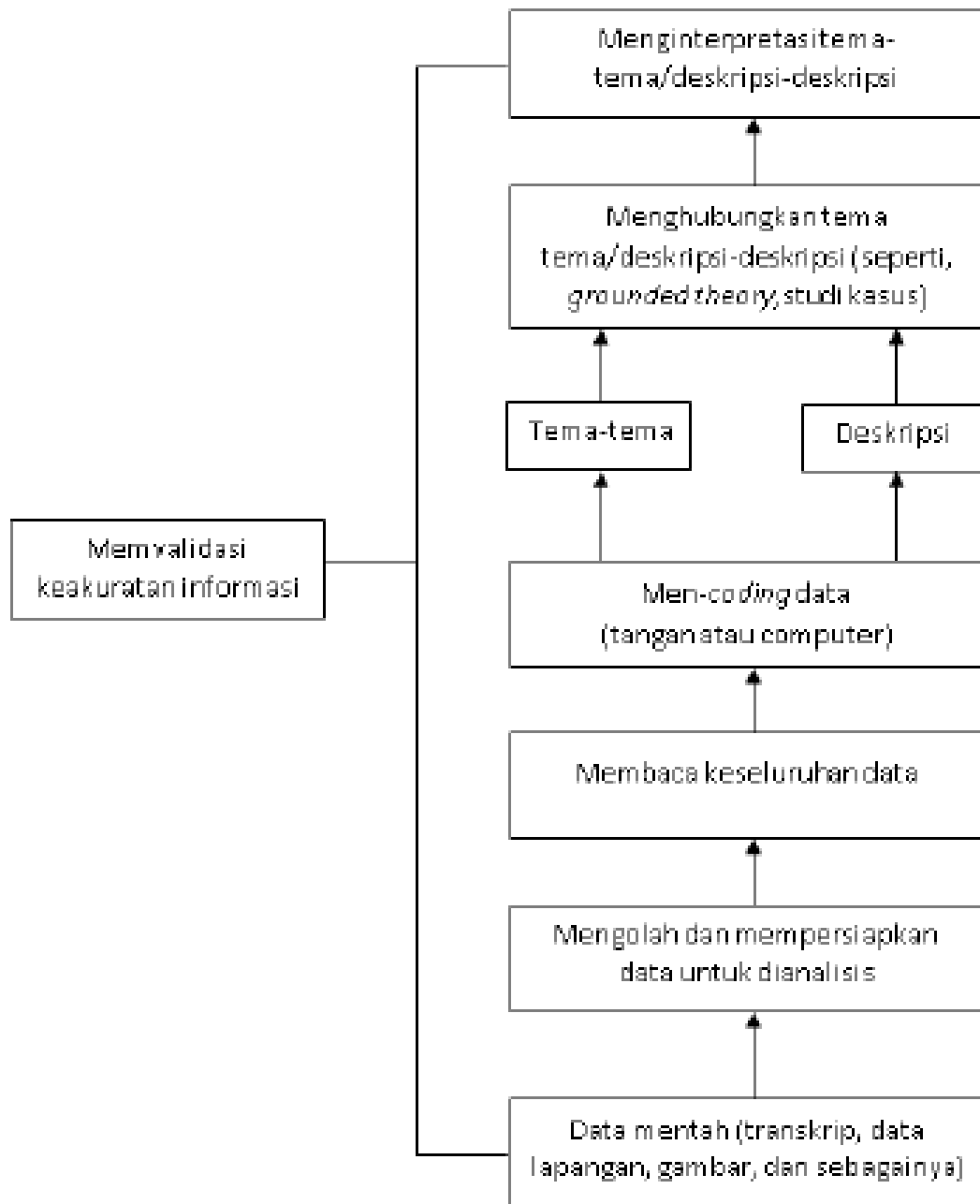
1. Peneliti, dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara.
2. Pedoman wawancara (*interview guide*), hal ini berguna untuk membatasi dan mengarahkan peneliti dalam mencari data-data yang diperlukan guna kegiatan penelitian. Sebelum melakukan wawancara peneliti membuat pedoman wawancara untuk mengetahui data apa yang diinginkan baik untuk memulai pencarian data, maupun memperdalam data yang sudah didapatkan sebelumnya.

3. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa peralatan penunjang, diantaranya yaitu alat rekaman dan foto melalui telepon seluler peneliti, serta buku catatan.

### **3.7 METODE DAN ANALISIS DATA**

Analisis data yaitu suatu proses pemaknaan dari kesimpulan yang dibuat dan berguna untuk memecahkan masalah yang diteliti. Setelah data-data yang diperoleh dari studi pustaka dan riset lapangan diolah, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Analisa data yang dilakukan peneliti adalah mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data Cresswell, yang dianggap penulis bisa menterjemahkan dengan mudah semua data yang ada menjadi sebuah informasi, selain juga dianggap sebagai teori baru. Walaupun model analisis sangat banyak dan berbeda-beda, penelitian kualitatif pada umumnya menggunakan prosedur yang umum dan langkah-langkah khusus dalam analisis data. Cresswell (2016: 27) memberikan pemahaman bahwa cara yang ideal adalah dengan mencampurkan prosedur umum tersebut dengan langkah-langkah khusus. Untuk lebih jelasnya, dijabarkan dengan gambar berikut:



Gambar 3 Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif

Sumber: John W. Cresswell (2014:277)



Pendekatan di atas dapat dijelaskan lebih mendalam dan detail dalam langkah-langkah analisis berikut ini:

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara, menyalin literature, menyetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data yang ada serta relevan berkaitan dengan koordinasi lintas sektoral dalam implementasi kebijakan pemanfaatan sumber daya alam berbasis *sustainable development* di TPST Mulyoagung Bersatu Dau Kabupaten Malang ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.
2. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun *general sense* atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan. Gagasan umum apa yang terkandung dalam perkataan informan, bagaimana inti gagasan-gagasan tersebut, bagaimana kesan yang timbul, kredibilitas, dan penuturan informasi itu. Di dalam tahap ini, peneliti menulis catatan-catatan khusus atau gagasan-gagasan umum tentang data yang diperoleh mengenai koordinasi lintas sektoral dalam implementasi kebijakan pemanfaatan sumber daya alam berbasis *sustainable development* di TPST Mulyoagung Bersatu Dau Kabupaten Malang.
3. Menganalisis lebih detail dengan meng-*coding* data. *Coding* merupakan proses mengolah materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Langkah ini melibatkan beberapa tahap yaitu

mengambil data tulisan atau gambar-gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan, mensegmentasi kalimat, paragraph, atau gambar tersebut ke dalam kategori, kemudian melabeli kategori tersebut dengan istilah khusus yang sering kali didasarkan pada istilah/Bahasa yang benar-benar berasal dari informan (disebut istilah *in vivo*). Dalam hal ini, penulis memilah-milah mana data yang termasuk dalam implementasi kebijakan di fokusnya dan mana yang merupakan faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut seperti pada fokus penelitian.

4. Terapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting*, orang, kategori, dan tema untuk kemudian dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang, lokasi, atau peristiwa dalam *setting* tertentu yang ada di dalam proses penelitian tentang koordinasi lintas sektoral dalam implementasi kebijakan pemanfaatan sumber daya alam berbasis *sustainable development* di TPST Mulyoagung Bersatu Dau Kabupaten Malang.
5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema ini tersajikan kembali dalam laporan penelitian sebagaimana penulis lakukan dalam analisis data.
6. Langkah terakhir adalah interpretasi data atau memaknai data

### 3.8 KEABSAHAN DATA

Dalam setiap penelitian diperlukan adanya keabsahan data agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Keabsahan data juga berfungsi sebagai salah satu fungsi dari indikator kualitas penelitian dan memastikan bahwa hasil penelitian jauh dari keraguan di dalamnya (Henny, 2014:85). Ada 4 teknik dalam menetapkan keabsahan data yang diterapkan oleh Moleong (2012:324), yaitu :

1. Derajat Kepercayaan (*Credibility*)

Kredibilitas merupakan salah satu penetapan hasil penelitian kualitatif dimana dapat dipercaya dari perspektif partisipan terkait penelitian tersebut. Dalam hal ini, peneliti telah melakukan observasi langsung di TPST Mulyoagung Bersatu sehingga dapat dijadikan pembuktian bahwa penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

2. Keteralihan (*Transferability*)

Keteralihan sebagai persoalan empiris bergantung pada kesamaan antara konteks pengirim dan penerima. Dalam hal ini, untuk melakukan pengalihan tersebut peneliti mencari serta mengumpulkan bukti-bukti empiris. Dengan demikian peneliti bertanggung jawab untuk menyediakan data deskriptif. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian kepada Kepala Desa Mulyoagaung, Pengelola TPST Mulyoagung Bersatu, serta masyarakat Desa Mulyoagung. Sehingga dapat dijadikan pembuktian bahwa penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

### 3. Kebergantungan (*dependability*)

Konsep *dependability* lebih luas dari reabilitas. Hal ini dikarenakan peninjauan dari segi konsep lebih diperhitungkan, yakni yang ada pada realibilitas itu sendiri dan ditambah dengan faktor-faktor lainnya yang sesuai. dalam hal ini, penelitian ini melakukan observasi langsung dengan membawa pedoman wawancara sebagai unsur penelitian terhadap TPST Mulyoagung Bersatu.

### 4. Kepastian (*Confirmability*)

Menurut Scriven dalam Moleong (2012:326) masih ada unsur kualitas yang melekat pada konsep objektivitas itu diambil dari pengertian bahwa jika sesuatu itu objek, maka hal tersebut dapat dipercaya karena berdasarkan fakta-fakta empiris. Jika subjektif maka tidak dapat dipercaya karena bersifat opini/tidak sesuai dengan fakta empiris. Pengertian terakhir inilah yang dijadikan tumpuan pengalihan pengertian objektivitas-subjektivitas menjadi kepastian. Peneliti telah mengambil data secara objektif dan subjektif selama masa penelitian yang telah dilakukan.

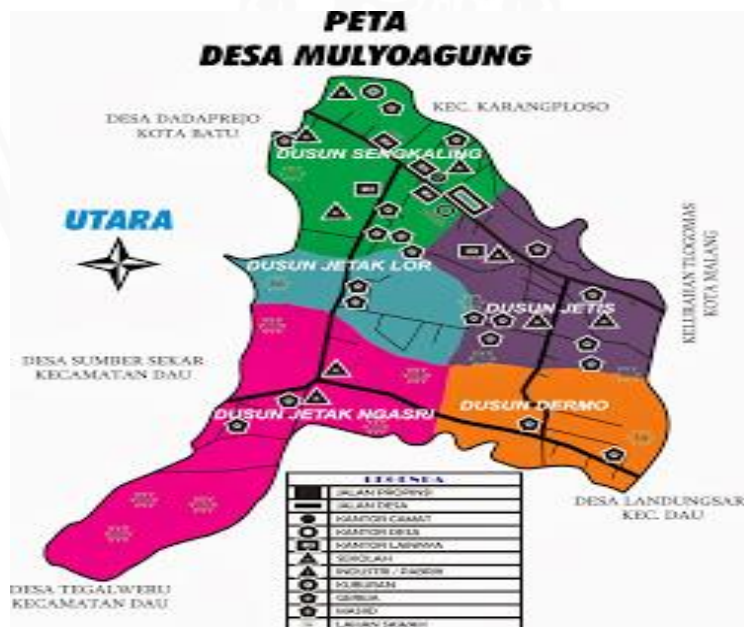
**BAB IV**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**4.1 Gambaran Umum Desa Mulyoagung**

**4.1.1 Keadaan Geografis dan Topografi Desa**

Desa Mulyoagung adalah merupakan desa yang berhawa sejuk dengan suhu udara rata-rata 20° C dan salah satu dari 10 Desa yang ada di Kecamatan Dau dan berbatasan dengan Kota Malang. Kabupaten Malang dan Kota Batu dengan batas desa sebelah utara Sungai brantas dan Desa Tegal gondo, sebelah selatan Desa Landungsari dan sungai Metro, sebelah Barat Desa Sumbersekar dan Kota Batu dan sebelah timur Kota Malang dan Desa Landungsari. Berikut merupakan Gambar Peta Desa Mulyoagung:



Gambar 4. Peta Desa Mulyoagung

Sumber: Arsip Desa Mulyoagung, 2018

Wilayah Desa Mulyoagung terbagi atas 5 dukuh dengan 20 RW dan 65 RT yang meliputi Dukuh Dermo, Dukuh Jetak Ngasri, Dukuh Jetak Lor, Dukuh Sengkaling, dan Dukuh Jetis. Kemudian luas Wilayah Desa Mulyoagung adalah 296.000 ha. Untuk rincian luas wilayah serta penggunaan lahan Desa Mulyoagung sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Rincian Luas dan Penggunaan Lahan Desa Mulyoagung**

No	Jenis Tanah	Luas Tanah
1.	Sawah	46.831 Ha
2.	Tegal/Ladang	9.595 Ha
3.	Pekarangan	6.480 Ha
4.	Pemukiman	200.343 Ha
5.	Tanah Kas Desa	10.000 Ha
6.	Fasilitas Umum	22..391 Ha
	<b>Jumlah</b>	296.000 Ha

*Sumber: Data Diolah Penulis, 2018*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dengan jumlah keseluruhan 296.000 Ha, penggunaan lahan terbanyak di Desa Mulyoagung diperuntukkan lahan pemukiman dengan jumlah 200.343 Ha atau sekitar 67%. Sedangkan tata guna lahan untuk Tanah kas Desa sekitar 10.000 Ha atau jika

dipersenkan sebanyak 3,7% dari total keseluruhan lahan. Sebagian kecil dari jumlah tanah kas Desa dipergunakan untuk tempat pengelolaan sampah terpadu Desa Mulyoagung dengan jumlah sekitar 2000m<sup>3</sup>.

#### 4.1.2 Demografi

Desa Mulyoagung berdasarkan hasil registrasi penduduk menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa Mulyoagung pada tahun 2018 sebesar 15.266 jiwa, yang terdiri dari 7.689 jiwa penduduk laki-laki dan 7.577 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk tersebut berada pada 4.221 keluarga. Pada tahun 2018 penduduk laki-laki jumlahnya lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Adapun kepadatan penduduk di Desa Mulyoagung berdasarkan angka dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.**

#### **Jumlah Penduduk Desa Mulyoagung**

No	Usia	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1	0-6 tahun	532	489
2	7-12 tahun	721	646
3	13-18 tahun	732	696
4	19-25	872	810
5	26-40 tahun	1.775	1.793
6	41-55	1.619	1.793
7	56-65 tahun	901	774
8	65-75 tahun	341	357
9	>75 tahun	196	219
Jumlah Penduduk		7.493	7.358
Total		15.226	
Jumlah KK		4.221	
Kepadatan Penduduk		5.157	

*Sumber: Arsip Desa Mulyoagung, 2018*



Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa total penduduk Desa Mulyoagung adalah 15.226 jiwa. Dengan jumlah penduduk perempuan 7.358 jiwa dan penduduk laki-laki yang lebih banyak yaitu 7.493 jiwa. Dengan 4.221 jumlah KK serta Kepadatan Penduduk 5.157 jiwa.

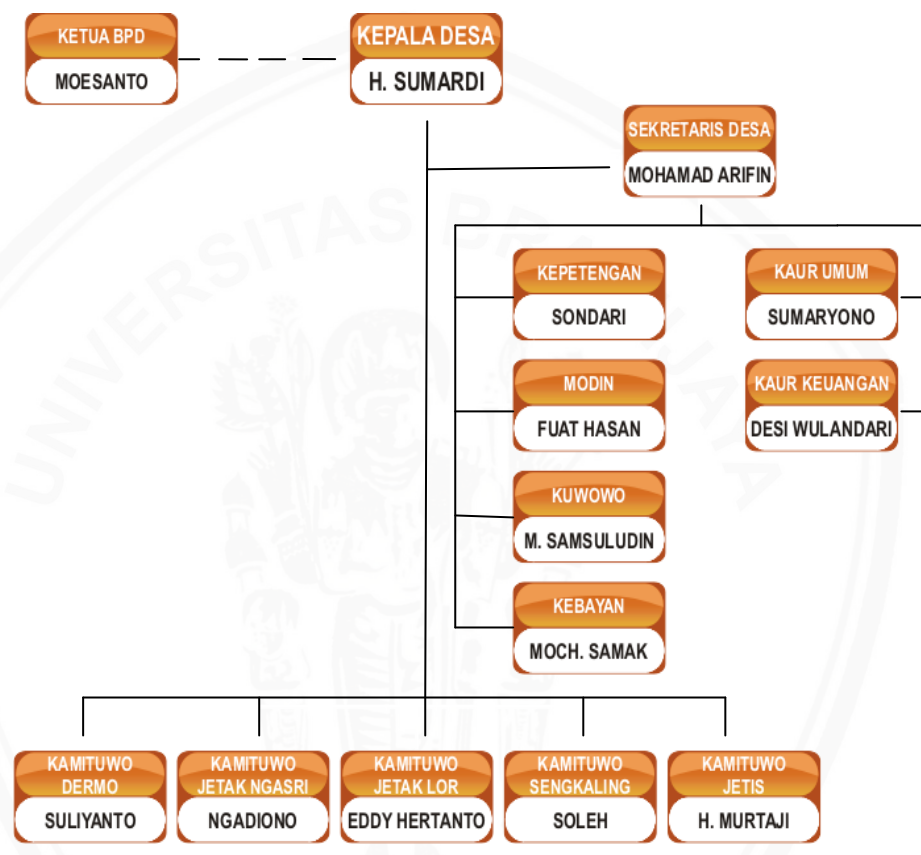
#### **4.1.3 Sejarah Tokoh Pemimpin Desa Mulyoagung**

Sejarah Pemimpin Desa Mulyoagung dimulai dari jaman penjajahan Belanda sebagai Kepala Desa Pertama adalah bapak Ngatemi dari Dukuh Jetis, yang memimpin sampai pada tahun penjajahan bangsa Jepang di Indonesia, kemudian kepemimpinan Desa dilanjutkan oleh Bapak Karyo Truno pada saat Jepang telah keluar Indonesia hingga tahun kemerdekaan Indonesia. Di tahun kemerdekaan Indonesia itu juga kepemimpinan desa oleh Bapak Karyo Truno diserahkan kepada anaknya bernama Mustopo yang memimpin pada tahun 1945, hingga pada tahun 1945 hingga pada tahun 1986 beliau meninggal dunia, maka pada tahun itu juga kepemimpinan bapak Mustopo ada telah vakum, sehingga jabatan kepala desa diatur oleh pihak Kecamatan dengan Penempatan Pejabat Sementara dari staf Kecamatan Dau yaitu Bapak Rokim yang menjabat selama 1 tahun.

Pada tahun 1987 diadakan Pemilihan Kepala Desa Mulyoagung dan merupakan yang pertama kali diadakannya Pemilihan Kepala Desa Mulyoagung, dan terpilihlah bapak Djuwahir seagai Kepala Desa Mulyoagung yang baru. Kepemimpinan Bapak Djuwahir sebagai Kepala Desa Mulyoagung selama Dua periode jabatan karena terpilih lagi pada pemilihan Kepala Desa tahun 1997 dan berakhir pada tahun 2006, namun diangkat lagi sebagai Pejabat Kepala Desa



Mulyoagung yang akan berakhir pada bulan Juni tahun 2007. Bulan Juni dengan berakhirnya pejabat kepala desa telah terpilih lagi bapak H. Sumardi sebagai kepala Desa Mulyoagung periode 2007-2012, dan terpilih kembali untuk periode 2013-2019. Berikut adalah Struktur organisasi Desa Mulyoagung saat ini:



Gambar 5. Struktur Organisasi Desa Mulyoagung

Sumber: Arsip Desa Mulyoagung

## 4.2 Gambaran Umum TPST Mulyoagung

### 4.2.1 Latar Belakang Berdirinya TPST Mulyoagung Bersatu

Dahulu sebelum TPST berdiri di Desa Mulyoagung, sampah menjadi suatu permasalahan lingkungan di Desa Mulyoagung. Lahan yang digunakan sebagai Tempat Pembuangan Sementara (TPS) terletak di pinggir Sungai Brantas,

sehingga seringkali sampah-sampah ikut terbuang di sungai. Tentunya hal ini menimbulkan pencemaran lingkungan seperti ini, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Kabupaten Malang menanggapi fenomena tersebut dengan memberikan teguran kepada Kepala Desa Mulyoagung dan warga sekitar. Kepala Desa Mulyoagung diminta untuk merelokasi TPS dari pinggir Sungai Brantas dan mengolah sampah atau mereka akan dijerat hukuman karena melakukan tindak kejahatan merusak lingkungan.

Kondisi demikian akhirnya melahirkan sebuah pemikiran untuk mengolah lahan yang dimiliki desa Mulyoagung. Sejak tahun 2009, warga desa Mulyoagung yang tergabung dalam Panitia Pembangunan TPST mulai merintis pengolahan lahan untuk dijadikan tempat pengelolaan sampah agar mendapat bantuan. Pada tahun 2010 ada pembiayaan pembangunan TPST ini, dari empat mata anggaran yaitu PNPB, APBD, APBD dan desa. Anggaran tersebut dialokasikan untuk menyediakan Lahan tempat berdirinya TPST Mulyoagung Bersatu, bangunan dan infrastruktur yang dibutuhkan serta alat-alat penunjang yang digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas pengelolaan dan pengolahan sampah.

Setelah berdiri dan beroperasi mulai 2 Februari 2011, kini TPST Mulyoagung Bersatu terletak di Jalan Raya TPST No. 1 Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Adapun lokasi TPST Mulyoagung Bersatu sebagaimana pada gambar dibawah ini:



Gambar 6. Lokasi TPST Mulyoagung Bersatu

*Sumber: Hasil dokumentasi Penelitian*

Sesuai dengan yang disebutkan pada Peraturan Desa Mulyoagung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) untuk Menuju Desa Mulyoagung yang Bersih, Sehat, dan Bermutu, Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu yang selanjutnya disebut TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang dan pengolahan sampah di Desa Mulyoagung. TPST Mulyoagung Bersatu merupakan upaya swadaya masyarakat yang di dukung oleh pemerintah dengan memberikan sarana prasarana membangun TPST Mulyoagung Bersatu. TPST Mulyoagung Bersatu ini diharapkan mampu membantu pemerintah dalam pengolahan sampah di wilayah desa Mulyoagung melalui cara terpadu yaitu pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pembuangan akhir. Kini TPST Mulyoagung dikelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang merupakan perwakilan dari

masyarakat Desa Mulyoagung dan menjadi binaan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang.

#### **4.2.2 Visi dan Misi**

Visi dari TPST Mulyoagung adalah terciptanya kualitas hidup yang bersih, sehat dan nyaman di Desa Mulyoagung. Misi :

- 1) Membantu pemerintah dalam rangka meningkatkan kebersihan lingkungan
- 2) Meningkatkan pengendalian dan pengelolaan sampah secara terpadu
- 3) Meningkatkan kegiatan usaha ekonomi produktif berbasis sampah
- 4) Meningkatkan kerjasama serta kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan

#### **4.2.3 Tujuan**

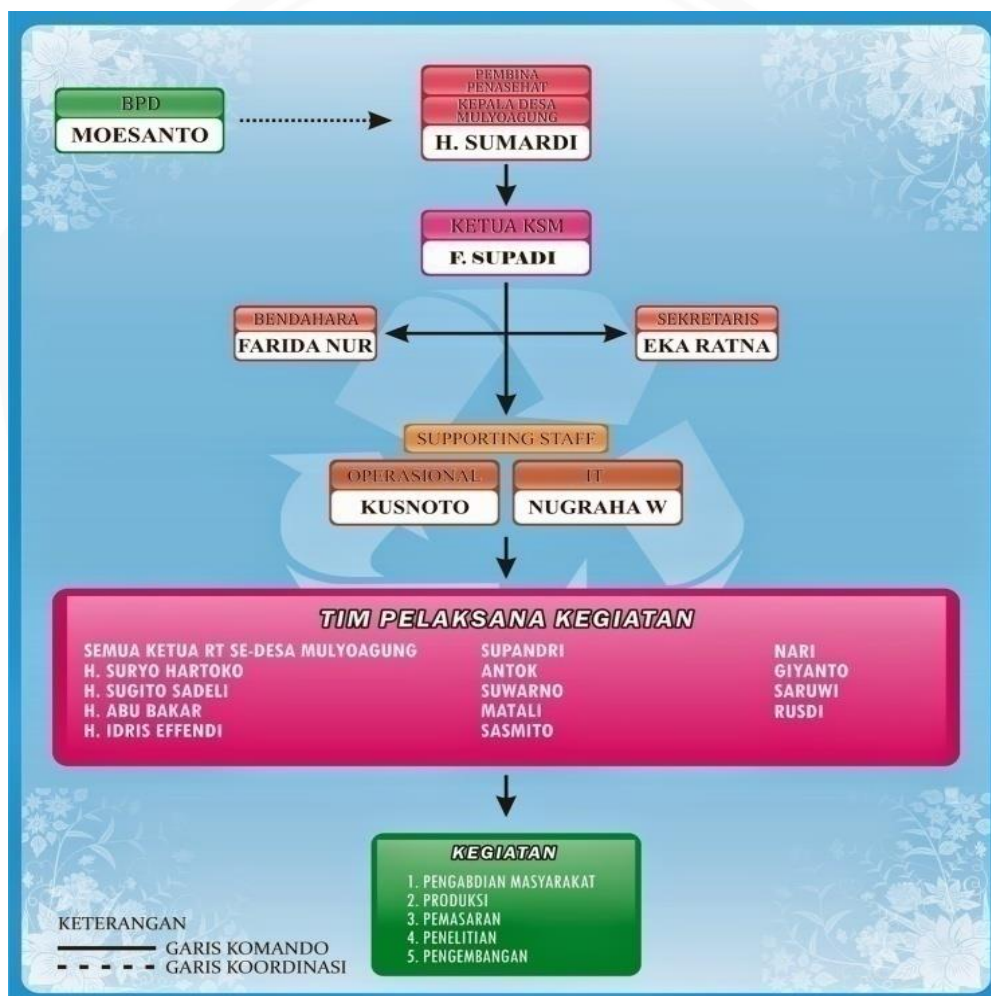
Tujuan dari dibentuknya KSM TPST 3R Di Wilayah Desa Mulyoagung adalah untuk membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Tujuan Spesifik:

- 1) Terwujudnya kebersihan lingkungan serta kehidupan sosial sehat.
- 2) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengendalian kebersihan lingkungan.
- 3) Meningkatkan kerukunan, potensi dan ekonomi masyarakat luas
- 4) Terciptanya kegiatan ekonomi masyarakat yang berbasis sampah.
- 5) Meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

#### 4.2.4 Struktur Organisasi

Susunan organisasi dalam suatu instansi atau organisasi swadaya masyarakat ada untuk menentukan tugas dan wewenang para pegawai dalam menjalankan tugasnya. Maka dari itu dengan adanya struktur organisasi dapat mengetahui hierarki pada suatu organisasi swadaya masyarakat pada TPST Mulyoagung. Adapun susunan dari struktur organisasi sebagai berikut:



Gambar 7. Struktur Organisasi Kelompok Swadaya Masyarakat TPST Mulyoagung Bersatu

Sumber: TPST Mulyoagung Bersatu, 2018



Berdasarkan gambar diatas bahwa Pembina dan penasehat dari TPST Mulyoagung Bersatu adalah Kepala Desa. Dibawahnya ada Bapak Supadi selaku Pengelola TPST Mulyoagung dibantu dengan Bendahara serta Sekertaris yang memiliki 2 *Supporting Staff* dibawahnya. Serta dibantu oleh Ketua RT se-Desa Mulyoagung serta pegawai/pekerja TPST Mulyoagung Bersatu.

### **4.3 Penyajian Data**

#### **4.3.1 Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Program Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat**

Pelaksanaan Program pemberdayaan seperti pengelolaan sampah berbasis masyarakat memang sudah seharusnya ditunjang dengan pemberian fasilitas pemberdayaan yang nantinya akan mampu mendukung Program pemberdayaan itu sendiri. Upaya pemberdayaan untuk masyarakat desa Mulyoagung dilakukan berdasarkan Program Pengelolaan Berbasis Masyarakat. Sedangkan masyarakat desa yang akan diberdayakan melalui Program pengelolaan sampah berbasis masyarakat dikhususkan untuk masyarakat Desa Mulyoagung. Pemberdayaan melalui program pengelolaan sampah berbasis masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Desa Mulyoagung dan TPST Mulyoagung Bersatu dengan berbagai upayanya. Namun sesuai dengan konsep pemberdayaan itu sendiri, upaya pemberdayaan yang dilakukan melalui pengelolaan sampah melalui pemberdayaan masyarakat, sebagai berikut:

### a. Bantuan Dana Sebagai Modal Usaha

Suatu Program usaha yang menduduki posisi penting adalah permodalan. Permodalan menjadi salah satu faktor utama yang sangat mempengaruhi berkembang atau tidaknya suatu usaha tidak terkecuali Program pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Tanpa dukungan permodalan yang baik atau modal yang cukup, maka suatu Program bisa berjalan lambat atau bisa juga sama sekali tidak berkembang. Dalam proses pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan diupayakan sebagai tambahan penghasilan sehingga berujung pada kesejahteraan. Sudah menjadi salah satu syarat utama yaitu manajemen permodalan yang baik. Permodalan untuk pembangunan TPST Mulyoagung Bersatu difasilitasi oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Pemerintah Kabupaten, serta swadaya masyarakat berupa tanah kas Desa seluas 4000m<sup>3</sup>. Pada dasarnya Pengelolaan sampah berbasis masyarakat merupakan salah satu Program yang tidak memakan biaya banyak. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Supadi selaku Pengelola TPST Mulyoagung Bersatu:

“karena awalnya TPS di Mulyoagung berada di tepi sungai berantas yang mengganggu kenyamanan warga, dan pada akhirnya ada program pengelolaan sampah berbasis masyarakat ini lalu kami berkomitmen membangun TPST Mulyoagung. Bermodal dana APBN yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten dan desa memberikan bantuan berupa lahan untuk pembangunan TPST.” (wawancara tanggal 13 April 2018 di TPST Mulyoagung)

Terlepas dari modal yang telah diberikan pemerintah Pusat dan Pemerintah Desa TPST Mulyoagung adalah TPST yang mandiri karena biaya

pengelolaan sampah yang kurang lebih biayanya Rp 140.000.000/bulan ini berasal dari iuran masyarakat yang dibanderol minimal 8000 Rupiah serta maksimal 12.000 Rupiah dengan jumlah 6000 KK dan iuran yang harus dibayar pada setiap bulan. Selain untuk biaya pengelolaan sampah, uang iuran dari masyarakat digunakan untuk gaji para pekerja di TPST Mulyoagung ini. Seperti yang disampaikan oleh Pengelola TPST Mulyoagung Bersatu:

“...dari modal yang telah diberikan oleh pemerintah ini memang benar-benar untuk biaya pembangunan mbak. Pengelolaan sampah disini mandiri dengan biaya yang ditanggung oleh iuran per KK yang ada di Desa Mulyoagung yaitu 6000 KK. Iurannya hanya 8000-12.000 mbak, murah... jadi kurang lebih 140.000.000 rupiah per bulan digunakan untuk biaya operasional pengelolaan sampah disini” (wawancara tanggal 13 April 2018 di TPST Mulyoagung)

Dalam pengelolaan keuangan di TPST Mulyoagung ini masih belum mengalami kendala karena selama ini tidak ada complain atas tuntutan iuran yang diberikan TPST Mulyoagung terhadap warga Desa Mulyoagung. Tidak adanya perubahan nominal dalam pungutan iuran untuk TPST Mulyoagung selama ini. Sehingga membuat masyarakat dengan ikhlas memberikan iuran untuk biaya operasional pengelolaan sampah di TPST Mulyoagung. Seperti yang disampaikan salah satu pekerja TPST Mulyoagung yang juga warga Desa Mulyoagung:

“...ya bagaimana ya mbak? Orang minimal Cuma 8000, jadi kita seikhlasnya saja untuk bayar iuan, lagipula iurannya juga dilakukan perbulan, toh itu juga tidak diperuntukkan biaya pengelolaan saja, namun untuk gaji pokok pegawai disini mbak..” (wawancara tanggal 10 April di TPST Mulyoagung Bersatu)

Kesimpulan yang didapat dari penjelasan diatas bahwa TPST Mulyoagung Bersatu dan Pemerintah Desa Mulyoagung sudah berupaya terkait program



pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan memberdayakan warga desanya dan dengan memberikan permodalan untuk pembangunan TPST Mulyoagung Bersatu. Pemerintah Desa Mulyoagung yang menjalankan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat sudah melaksanakan tugasnya walaupun tidak memberikan bantuan berbentuk uang. Sedangkan beban iuran untuk para warga Desa Mulyoagung juga tidak memberatkan warga dikarenakan warga Desa Mulyoagung masih mampu memberikan kontribusinya terhadap pengelolaan sampah berbasis masyarakat di TPST Mulyoagung Bersatu ini.

**b. Pembangunan Prasarana Sebagai Pendukung Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat.**

Dalam suatu program pembangunan prasarana merupakan hal yang penting dalam proses berjalannya suatu program tersebut. Dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai yang telah difasilitasi oleh pemerintah dalam proses pelaksanaan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat sebagai upaya pengelolaan sampah yang lebih baik diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan maksimal secara berkesinambungan. Berikut adalah beberapa sarana prasarana dari pemerintah pusat untuk TPST Mulyoagung:

- 1) PNPM Mandiri Pedesaan berupa bangunan pagar tembok seluas 2000m<sup>3</sup> dengan anggaran Rp 100.000.000 Tahun 2009
- 2) APBD Kabupaten Malang berupa bangunan pagar tembok ukuran 3 meter x 100 meter sebelah barat dengan anggaran Rp 100.000.000 tahun 2010
- 3) APBN 2010 Anggaran 1.2 M yang berupa : bangunan hangar baja ukuran 12 meter x 48 meter, bangunan Kantor 4 meter x 8 meter, bangunan

gudang 3 meter x 6 meter, bangunan pos keamanan 2 meter x 2 meter, Tossa 2 unit, mesin penggiling 1 unit, mesin ayakan 1 unit, dan jalan 4 meter x 300 meter.

- 4) Bupati Malang dengan anggaran Rp 45.000.000 tahun 2011 berupa Mobil Colt Pickup TI20 dan DP Tossa 2 unit.

Dengan adanya prasarana yang memadai untuk berlangsungnya program Pengelolaan sampah berbasis masyarakat, TPST Mulyoagung berjuang untuk membuktikan komitmen masyarakat Desa yang ingin menanggulangi sampah dan membuktikan betapa masyarakat Desa Mulyoagung tersebut berdaya. Sehingga dalam jangka waktu 2 tahun masyarakat pekerja di TPST Mulyoagung membuktikan bahwa pengelolaan sampah berbasis masyarakat telah memberikan dampak yang baik bagi masyarakat sekitar dan bisa menanggulangi sampah sesuai dengan tujuan dari program pengelolaan sampah berbasis masyarakat itu sendiri. Pernyataan berikut sesuai dengan yang disampaikan pengelola TPST Mulyoagung Bapak Supadi :

“awal mula pembangunan TPST ini memang sempat tidak diterima warga mbak karena takut adanya pencemaran dan bau dimana-mana, tapi kami dari Lembaga Swadaya Masyarakat berkomitmen untuk melaksanakan program ini, dengan segala fasilitas dan modal yang telah memadai, saya dan pekerja TPST ini ingin membuktikan bahwa kami ingin menanggulangi permasalahan sampah yang ada di Desa Mulyoagung ini” (wawancara dengan Bapak Supadi tanggal 13 April 2018 di TPST Mulyoagung Bersatu)

Setelah proses pengelolaan sampah di TPST Mulyoagung Bersatu ini beroperasi dari Tahun 2010 dengan berkomitmen membuktikan pengelolaan sampah berbasis masyarakat merupakan suatu upaya yang efektif dalam

menanggulangi permasalahan sampah, TPST Mulyoagung mendapatkan *reward* dan hibah dari berbagai instansi yang ingin membantu memajukan TPST Mulyoagung Bersatu. Beberapa sarana dan prasarana bantuan dari pihak luar adalah :

- 1) Dinas Kesehatan Kabupaten Malang memfasilitasi kesehatan seluruh pegawai TPST Mulyoagung mulai Tahun 2011
- 2) Hibah dari TPA Talang Agung Kepanjen Kabupaten Malang 1 Unit Mesin Perajang Kompos
- 3) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang Anggaran tahun 2011 berupa : 1 buah Truck Elf, 1 unit mesin jahit karung, dan 11 mesin unit pompa air
- 4) PNPM Mandiri Pedesaan Tahun 2011 Berupa bangunan jembatan yang menghubungkan TPST dengan Dukuh Jetak Lor dengan anggaran Rp 100.000.000
- 5) Dinas Peternakan Kabupaten Malang Berupa 11 ekor kambing Anggaran Tahun 2012
- 6) APBN anggaran 2012 yaitu berupa: bangunan hangar baja ukuran 12 meter x 36 meter, halaman paving 1500 m<sup>2</sup>, Tossa 4 unit, mesin perajang kompos 1 unit, mesin ayak 1 unit, mesin mixer pupuk 1 unit dan mesin perajang gelas aqua 1 unit.
- 7) Dinas Perikanan Kabupaten Malang Berupa Pompa air 1 unit dan Roll jarring paranet dengan Anggaran tahun 2012

- 8) Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang Berupa peningkatan alan TPST aspal menjadi Hotmix
- 9) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang peningngkatan jalan tembus TPST ke Dukuh Jetak Lor dengan paving
- 10) APBN melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang berupa bangunan MCK Plus Sehati dnegan dana DAK Anggaran Rp 218.000.000 Tahun 2012
- 11) APBD dari Dinas Perikanan berupa 7 unit kolam permanen beton ukuran 5x7x1m tahun 2013
- 12) PNPM Mandiri Pedesaan Berupa Penambahhan Pinjaman Modal prakoprasi Pegawai TPST-3R Mulyoagung Bersatu sebesar Rp 60.000.000 tahun 2013
- 13) APBD dari Dinas Cipta Karya berupa ruang Pertemuan (pelatihan) ukuran 8x12m tahun 2013
- 14) Sumber dana kemitraan Dinas Cipta Karya berupa 1 unit Tossa Armada roda tiga tahun 2014.

Fasilitas sarana dan prasana yang diberikan dari berbagai pihak telah memenuhi kebutuhan dari TPST Mulyoagung sendiri, namun memang ada beberapa hal yang dibutuhkan oleh pegawai TPST Mulyoagung yang belum bisa difasilitasi oleh pemerintah maupun pihak swasta yang lain. Namun upaya dari pengelola TPST Mulyoagung untuk meminta bantuan terhadap pemerintah pusat masih didengar dan diberikan bantuan oleh pemerintah. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Supadi selaku Pengelola TPST Mulyoagung Bersatu:

“..disini kalau terjadi apa-apa ya saya tetap menghubungi pemerintah untuk minta bantuan mbak kayak ban truck yang meletus, seragam warga, sepatu boot... dan Alhamdulillah pemerintah selalu memberikan bantuan walaupun tidak berupa uang tapi berupa fisik” (wawancara dengan bapak Supadi tanggal 13 April 2018 di TPST Mulyoagung Bersatu)

Kesimpulannya adalah dengan adanya sarana prasarana, sebuah program yang dilaksanakan pun akan menjadi program yang berhasil dan terwujud sesuai dengan harapan. Sarana prasana memang memegang peran penting demi berlangsungnya suatu program.

**c. Penyediaan Sarana untuk Memperlancar Pemasaran Hasil Produksi Dan Jasa Masyarakat**

Sarana pengumpulan sampah yang digunakan untuk pola ini berupa gerobak sampah dan motor. Volume sampah yang diangkut berasal dari RT/RW, sampah yang diangkut dengan motor ke TPST yaitu sampah basah dan kering. Upaya penyediaan sarana untuk memperlancar hasil produksi memang seharusnya difasilitasi dan diberi oleh pemerintah. Karena sarana merupakan alat pendukung bagi jalannya suatu program. Pengelola TPST Mulyoagung menyampaikan bahwa bantuan dari Pemerintah sudah cukup untuk proses pemasaran hasil produksi di TPST Mulyoagung ini. Pernyataanya adalah sebagai berikut:

“...motor, truck, pickup, beton, Alhamdulillah sudah diberi oleh pemerintah maupun pihak swasta yang ingin menghibahkan dananya kesini mbak, jadi untuk pemaasaran kami tidak perlu khawatir akan prosesnya karena sarana dari pemerintah sudah cukup membantu” (wawancara dengan bapak Supadi tanggal 13 April 2018 di TPST Mulyoagung Bersatu)

TPST 3R Mulyoagung Bersatu setiap harinya mengolah sekitar 133 m<sup>3</sup>.

Pengangkutan sampah dari rumah warga setiap harinya dilakukan satu kali pada

pagi hari. Di TPST 3R Mulyoagung Bersatu ini terdiri dari 5 zona. Seperti pada grafik dibawah ini:



Gambar 8. Proses pengelolaan sampah

*Sumber: Data diolah penulis, 2018*

Pertama, zona pemilahan awal dimana sampah yang datang kemudian dipilah terlebih dahulu. Kemudian zona pemackingan. Untuk zona ketiga adalah composting, dan zona keempat adalah peternakan kambing dan perikanan. Sedangkan zona terakhir adalah administrasi. Sampah dari warga yang masuk ke TPST 3R Mulyoagung Bersatu diawali dengan proses pemilahan. Proses pemilahan dikategorikan berdasarkan bahannya (kantong/botol plastik, kertas/kardus, sisa makanan, kaca, dan besi). Setelah proses ini, sampah-sampah tadi dipilah kembali berdasarkan warnanya. Sampah-sampah yang telah melewati proses pemilahan akan dikemas dengan cara dimasukkan ke dalam karung ataupun dipress secara manual atau mesin lalu kemudian dijual ke



pembeli/pengepul. Saat ini ada lima mitra yang bekerja sama untuk mengambil sampah yang telah dipilah.



Gambar 9. Proses Pemilahan sampah

*Sumber: Hasil Dokumentasi Penelitian, 2018*

Saat ini, TPST 3R Mulyoagung Bersatu memiliki 87 orang pegawai. Sedangkan hasil pengolahan sampah TPST 3R Mulyoagung Bersatu terdiri dari 39% sampah organik yang kemudian dijadikan kompos, 49% sampah non organik yang kemudian dijual kembali kepada mitra-mitra yang telah bekerja sama, sedangkan 12% sisanya adalah residu yang tidak dapat dimanfaatkan lagi untuk kemudian dibuang ke tempat pembuangan akhir untuk dijadikan biogas.

#### **d. Pelatihan Bagi Aparat dan Masyarakat**

Sebelum memulai sebuah kegiatan pengolahan sampah di TPST-Mulyoagung Bersatu, dilakukanlah sebuah pelatihan yang bertujuan agar terciptanya sistem pengolahan yang efektif dan efisien serta sesuai dengan

prinsip-prinsip 3R. Oleh karena itu, tepat pada tanggal 9-11 Juli 2011 bertempat di TPST Mulyoagung Bersatu diselenggarakan sebuah pelatihan khusus mengenai pengolahan sampah dengan baik yang diselenggarakan oleh PNPM Mandiri. Dengan adanya kegiatan ini maka diharapkan kinerja dari TPST Mulyoagung Bersatu untuk kedepannya bisa lebih lancar dan TPST Mulyoagung Bersatu dapat meraih kesuksesan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Supadi selaku Pengelola TPST Mulyoagung Bersatu:

“...pelatihan yang diselenggarakan Kelompok Swadaya Masyarakat disini memang hanya 1 kali di awal mbak, bentuk pelatihannya berupa pengenalan pengelolaan sampah berbasis masarkat serta pengenalan metode 3R dan pengenalan lingkungan bersih dan sehat sehingga menjadi bekal bagi pekerja kami untuk bekerja disini” (wawancara tanggal 13 April 2018 di TPST Mulyoagung Bersatu)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat di TPST Mulyoagung Bersatu, terdapat pelatihan metode 3R dan pengenalan lingkungan bersih dan sehat yang diadakan oleh KSM setempat pada awal mula TPST berjalan. Pelatihan yang diberikan diperuntukkan pegawai TPST Mulyoagung Bersatu. Pelatihan ini memberikan gambaran bagi pegawai dalam mengelola sampah. Selama pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat hanya terdapat 1 kali pelatihan.

Berikut merupakan gambar dokumentasi dari pelatihan pengelolaan sampah serta pengenalan lingkungan bersih dan sehat di TPST Mulyoagung Bersatu:





Gambar 10. Pelatihan pengelolaan sampah di TPST Mulyoagung Bersatu

*Sumber : Blog TPST Mulyoagung Bersatu*

Dengan adanya pembekalan yang berupa pelatihan pengelolaan sampah dan pengenalan lingkungan sehat, masyarakat yang menjadi pekerja di TPST Mulyoagung Bersatu menjadi tahu dan mengerti bahwa pengelolaan sampah berbasis 3R dan masyarakat ini menjadi upaya penanggulangan sampah yang lebih efektif. Serta masyarakat menjadi peduli akan lingkungan sekitar agar lingkungannya menjadi bersih dan sehat.

#### e. Penguatan Kelembagaan

Keberadaan lembaga dalam pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk memfasilitasi masyarakat dan memberikan kemudahan dalam melakukan akses-akses yang diinginkan oleh masyarakat. Berdasarkan Peraturan Desa Mulyoagung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Untuk Menuju Desa Mulyoagung Yang Bersih, Sehat dan Bermutu. Kepala Desa Mulyoagung Menimbang bahwa penambahan penduduk dan perubahan pola konsumtif masyarakat dan berkurangnya lahan kosong menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam sehingga mengakibatkan lingkungan yang tidak sehat dan tidak indah menjadi tanggung jawab masyarakat sehingga ditetapkan Peraturan Desa tentang Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu.

Lembaga yang berkaitan dengan Program pengelolaan sampah berbasis masyarakat adalah Lembaga Swadaya Masyarakat/Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan pemerintah Desa setempat. Kelompok Swadaya Masyarakat di Desa Mulyoagung sendiri terdiri dari Ketua KSM yaitu Bapak Supadi yang juga merupakan Pengelola TPST Mulyoagung Bersatu yang dibina oleh Bapak Sumardi selaku Kepala Desa Mulyoagung. Serta dibawah Ketua KSM ada Bendahara dan Sekretaris dan juga *Supporting Staff* dan membawahi semua ketua RT se Desa Mulyoagung. KSM dan Pemerintah Desa Mulyoagung merupakan aktor yang mengantar program pengelolaan sampah berbasis masyarakat agar bisa berjalan. Pernyataan berikut sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Supadi selaku pengelola TPST Mulyoagung:

“pemerintah desa dari awal memang hanya memberikan bantuan berupa fisik saja mbak, KSM disini juga Cuma memberikan fasilitas pelatihan di awal berjalannya program ini, agar menjadi pembekalan dan pengenalan terhadap pekerja-pekerja kami” (wawancara tanggal 13 April 2018 di TPST Mulyoagung Bersatu)

KSM dan Pemerintah Desa Mulyoagung memang tidak memberikan bantuan berupa uang. Namun keduanya memberikan bantuan berupa fisik yang sangat membantu bagi berjalannya program pengelolaan sampah berbasis masyarakat ini. Kelompok Swadaya Masyarakat Desa Mulyoagung dan pemerintah Desa merupakan pendamping sekaligus mediator untuk menghubungkan pihak TPST Mulyoagung dan pihak Pemerintah Kabupaten. Berikut adalah pernyataan dari Pengelola TPST Mulyoagung:

“...pemerintah desa adalah Pembina dan pendamping mbak, kalau ada apa-apa yang terjadi di TPST ini seperti butuh bantuan pakaian untuk pekerja baru, sarung tangan, bahkan bila ada ban pecah kita langsung menghubungi pemerintah desa untuk dihubungkan pemerintah kabupaten agar dapat bantuan” (wawancara pada tanggal 13 April 2018 di TPST Mulyoagung Bersatu)

Untuk menunjang berjalannya pengelolaan sampah berbasis masyarakat di TPST Mulyoagung memang dibutuhkan penguatan kelembagaan agar koordinasi bisa teratur sehingga melancarkan jalannya program tersebut. Berdasarkan hasil wawancara diatas, penguatan kelembagaan untuk TPST Mulyoagung Bersatu dikatakan melakukan tugas dan fungsinya dengan benar.

Pemerintah merupakan pihak yang memiliki peran untuk mengambil suatu keputusan atas dasar hukum dan pendanaan dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui TPST. Dalam hal ini, pengelolaan sampah berbasis masyarakat di TPST Mulyoagung bersatu memiliki landasan hukum yang

dijadikan acuan dalam pengelolaan sampah. Adapun landasan hukum atau dasar hukum dari pengelolaan sampah berbasis masyarakat di TPST mulyoagung yakni sebagai berikut:

**Tabel 4. Landasan Hukum Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Melalui TPST Mulyoagung Bersatu**

No	Aktor	Produk Hukum	Isi Dasar Hukum
1	Pemerintah Pusat	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008	Pengelolaan Sampah
2	Pemerintah Pusat	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009	Perlindungan dan Pengelolaan Sampah
3	Pemerintah Daerah Kabupaten Malang	Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2012	Pengelolaan Sampah
4	Pemerintah Desa Mulyo Agung	Peraturan Desa Mulyoagung Nomor 2 Tahun 2012	Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) untuk menuju Desa Mulyo Agung yang Bersih, Sehat dan Bermutu

*Sumber: Arsip Desa MulyoAgung 2016, data diolah penulis 2018*

Tabel diatas menunjukkan bahwa dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat di TPST Mulyoagung berdasarkan pada berbagai peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah baik dari pemerintah pusat, pemerintah kabupaten sampai kepada pemerintah desa. Selain landasan atau dasar hukum yang menjadi salah satu peran dari pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah di TPST Mulyoagung juga terdapat peran lain yakni pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan operasional pengelolaan sampah di TPST Mulyoagung. Berikut merupakan bentuk bantuan serta keterlibatan pemerintah baik pemerintah pusat sampai kepada pemerintah desa dalam rangka pengelolaan sampah berbasis masyarakat di TPST Mulyo Agung Bersatu:

**Tabel 5. Bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dan Pemerintah Desa Mulyoagung.**

No	Nama Aktor	Tahun	Bentuk Keterlibatan
1	Pemerintah Desa	2009	Bantuan berupa hibah tanah kas desa seluas 4000m <sup>3</sup> .
2	Pemerintah Pusat	2009	PNPM Mandiri Pedesaan berupa pagar tembok seluas 2000 m <sup>3</sup> dengan anggaran Rp. 100.000.000
3	Pemerintah Kabupaten	2010	Berupa bangunan pagar tembok ukuran 3mx100m sebelah barat dengan anggaran Rp. 100.000.000
4	Pemerintah Pusat	2010	Anggran 1,2 M yang berupa bangunan hanggar baja ukuran 12m x 48m, bangunan kantor TPST 4mx8m, bangunan gudang 3mx6m, bangunan pos keamanan 2mx2m, Tossa 2 unit, mesin penggiling 1 unit, mein ayakan 1 unit, dan jalan 4mx300m.

No	Nama Aktor	Tahun	Bentuk Keterlibatan
5	Bupati Malang	2011	Anggaran Rp. 45.000.000 bentuk bantuan berupa Mobil <i>Colt Pickup</i> T120 dan DP Tossa 2 unit
6	Dinas Kesehatan Kabupaten Malang	2011	Memfasilitasi kesehatan seluruh pegawai TPST Mulyoagung
7	Pemerintah Pusat	2011	PNPM Mandiri Pedesaan berupa bangunan jembatan yang menghubungkan TPST dengan dukuh Jetak Lor dengan anggaran Rp. 100.000.000
8	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang	2012	Anggaran berupa 1 buah <i>truck</i> Elf, 1 unit mesin jahit karung, dan 11 mesin unit pompa air.
9	Dinas Peternakan Kabupaten Malang	2012	Berupa 11 ekor kambing
10	Pemerintah Pusat	APBN	Berupa bangunan hanggar baja ukuran 12mx36m, halaman paving 1500m <sup>3</sup> , tossa 4 unit, mesin perajang kompos 1 unit, mesin ayak 1 unit, mesin mixer pupuk 1 unit, dan mesin perajang gelas aqua 1 unit.
11	Dinas Perikanan Kabupaten Malang	2012	Berupa pompa air 1 unit dan <i>Roll</i> jaring paranet
12	Dinas PU Bina Margaa Kabupaten Malang	2012	Berupa peningkatan jalan TPST aspal menjadi Hotmix
13	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang	2012	Peningkatan jalan tembus TPST ke Dukuh Jetak Lor dengan paving



No	Nama Aktor	Tahun	Bentuk Keterlibatan
14	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang	2012	Berupa bangunan MCK Plus Sehati dengan dana DAK Anggaran Rp.218.000.000
15	Dinas Perikanan	2013	APBD berupa 7 unit kolam permanan beton ukuran 5x7x1m
16		2013	Berupa penambahan pinjaman modal prakoprasi pegawai TPST-3R Mulyoagung Bersatu sebesar Rp.60.000.000
17	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang	2013	Berupa ruang pertemuan (pelatihan) ukuran 8x12m
18	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang	2014	Berupa armada tossa roda tiga

*Sumber : Arsip TPST Mulyoagung Bersatu, 2018*

Berdasarkan tabel diatas dan hasil dari penelitian ini dalam proses pengelolaan sampah berbasis masyarakat di TPST mulyoagung bersatu terdapat bantuan dari pemerintah baik dari pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Tetapi bentuk bantuan yang diberikan berupa bantuan fisik dan bukan bantuan berupa uang.

#### **4.3.2 Peran *Stakeholder* yang Terlibat dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat**

##### **1. Pemerintah**

Pemerintah merupakan instansi yang bertugas untuk memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Berbagai model pemberdayaan masyarakat tidak

luput dari peran pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi/kabupaten, dan pemerintah desa sebagai level terbawah dari organisasi pemerintah. Tak terkecuali pada pemberdayaan masyarakat terhadap pengelolaan sampah berbasis masyarakat di TPST Mulyoagung Bersatu. Pada pemberdayaan ini, adanya keterbilatan pemerintah baik dari pemerintah daerah Kabupaten Malang dan juga pemerintah desa Mulyoagung. Baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa berupaya untuk memberikan bantuan, bantuan tersebut dapat berupa uang pada awal mula pembangunan TPST Mulyoagung Bersatu, bantuan fisik yang berupa sarana dan prasarana. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Supadi selaku Pengelola TPST Mulyoagung Bersatu, yang menyatakan bahwa:

*“ehhhmm ya ada mbak keterlibatan pemerintah baik itu pemerintah daerah kabupaten maupun pemerintah desa sendiri dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat di TPST mulyoagung bersatu, yang secara umum sih pemerintah itu membuat suatu keputusan terkait dasar hukum dan pendanaan dari pengelolaan sampah kalau untuk yang dasar hukumnya nanti saya kasih mbak, sedangkan untuk pendanaan terkait peralatan dll untuk pemerintah kabupaten bantuannya bisa dari pemerintah kabupaten langsung maupun dari dinas-dinas terkait dengan TPST ini mbak. Dua-duanya dari pemerintah ini sama mbak bentuk bantuannya bantuan berupa sarana dan prasarana atau kalau ga ya Cuma berupa bantuan fisik seperti kendaraan atau alat transportasi, perbaikan kondisi jalan menuju TPST, perbaikan dan penambahan hanggar, diberikannya lahan untuk tempat kami melakukan pengelolaan sampah. Eh kita juga waktu itu sempat dapat bantuan dari adanya PNPM mandiri dan APBN mbak, ya sama bantuannya bukan berupa uang tapi lebih pada bangunan alat dll. jadi bantuan bukan berupa uang lebih di wujudkan gitu mbak.”* (Wawancara Tanggal 13 April 2018 di TPST Mulyoagung).

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Temi sebagai pekerja di TPST Mulyoagung bersatu, beliau menyampaikan bahwa:

*“bantuannya setau saya itu dari banyak pihak mbak, tapi kalau dari pemerintah daerah dan pemerintah desa itu kebanyakan bantuan berupa alat-*



alat yang kita perlukan. Misal ini waktu kita butuh truck sampah ya kita minta langsung ke pemerintah kabupaten. Kalau untuk pemerintah desa itu mulai awal berupa lahan ini yang kami gunakan, dan juga motor buat itu loh mbak ngangkutin sampah.” (Wawancara Tanggal 10 April 2018).

Bentuk bantuan mulai diberikan ketika awal pembentukan TPST bersatu desa mulyoagung yakni tahun 2009 sampai saat ini bantuan masih tetap berlangsung. Tetapi dalam kenyataannya bantuan dari pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat di TPST mulyoagung bersatu hanya sebagai pendampingan bukan sebagai pembimbing karena pada realitanya saat proses pengoperasian pengelolaan sampah di TPST ini semuanya secara mandiri oleh masyarakat. Sedangkan pemerintah hanya memberikan bantuan berupa peralatan, pembangunan gedung, sarana dan prasarana dan bantuan fisik lainnya.

## **2. Swasta**

Pemberdayaan masyarakat melalui pengolaan sampah berbasis masyarakat tidak hanya melibatkan peran pemerintah tetapi juga peran swasta. Swasta merupakan pihak ketiga dan juga bisa menjadi mitra bagi pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat. Keterlibatan pihak swasta berupa bantuan pendanaan maupun bantuan operasional dan juga bisa berbentuk segala macam kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemberian dukungan bagi pemberdayaan masyarakat. Pada pengelolaan sampah berbasis masyarakat di TPST mulyoagung bersatu tak terlepas dari dukungan pihak swasta. Segala macam bentuk bantuan yang diberikan oleh swasta dalam rangka pengelolaan sampah berbasis masyarakat di TPST mulyoagung diharapkan mampu mendukung pemberdayaan masyarakat. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat dari Bapak Supadi selaku pengelola dari TPST mulyoagung Bersatu, yang mengatakan bahwa:

“ya kalau untuk bantuan pihak swasta ada kok mbak, mulau awal TPST ini ada juga tidak luput dari bantuan swasta selain bantuan dari pemerintah. Pihak swasta sendiri itu ada yang dari LSM ada juga yang mitra binaan dari TPST ini dan juga ada yang dari luar negeri juga. Bahkan awal pengoperasian TPST ini itu ada pelatihan BES namanya nah pelatihan ini itu diselenggarakan oleh LSM dan pelatihan ini memberikan gambaran bagi pegawai terkait pemilahan sampah ada materi 3R itu mbak, terus kalau yang dari luar negeri itu ada bantuan dari CSR Aurtralia itu sekitar tahun 2011 memberikan bantuan berupa pembangunan hanggar sekitar 12mx12m dengan anggaran sekitar Rp. 100.000.00. ada juga pihak swasta yang memberikan kami alat operasinal gitu mbak” (Wawancara Pada Tanggal 13 April 2018 di TPST Mulyoagung Bersatu).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Temi selaku salah satu pegawai lama di TPST Mulyoagung Bersatu, beliau menyampaikan bahwa:

“kalau selama saya bekerja disini ya ada mbak bentuk-bentuk bantuan dari pihak swasta diluar pihak pemerintah, satau saya itu bantuan berupa hanggar dan peralatan buat pengelolaan sampah yang kami perlukan disini. Nahh awal saya masuk disini juga ada pelatihan itu kalau tidak salah diberikan oleh LSM.” (Wawancara Pada Tanggal 10 April di TPST Mulyoagung Bersatu).

**Tabel 6. Bantuan Pihak Swasta Kepada TPST Mulyoagung Bersatu**

No	Nama Aktor	Tahun	Bentuk Keterlibatan
1	LSM	2011	Mengadakan pelatihan kepada pegawai di TPST mulyoagung terkait Metode 3R dan Penyuluhan Lingkungan Bersih.
2	CSR Aurtralia	2011	Berupa pemberian hanggar seluar 12x12m dengan anggaran Rp. 100.000.000
3	Mitra TPA Talang Agung Kepanjen Malang	2011	Menghibahkan 1 unit mesin perajang kompos.

*Sumber : Arsip TPST Mulyoagung Bersatu 2017, data diolah penulis 2018*

Menurut pemaparan dari hasil wawancara dan penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat di TPST Mulyoagung Bersatu Dau Kabupaten Malang dapat dikatakan bahwa dalam pemberdayaannya terdapat keterlibatan peran pihak luar selain pemerintah. Dalam hal ini yakni pihak swasta yang juga dapat dikatakan sebagai mitra dari pemerintah. Adapun aktor swasta yang terlibat yakni LSM dengan bentuk keterlibatannya dengan pemberian pelatihan, CSR Australia dengan keterlibatannya membangun hanggra, dan Mitra dari TPST mulyoagung bersatu sendiri yakni TPA Talang Agung Kepanjen dengan memberikan mesin kompos. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa dalam pengopersian TPST Mulyoagung dalam rangka pemberdayaan masyarakat juga didukung oleh swasta.

### **3. Masyarakat**

Pengelolaa sampah berbasis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat tidak hanya didukung oleh peran dari pemerintah dan swasta tetapi juga keikut sertaan peran masyarakat. Peran masyarakat dianggap penting karena dapat digunakan sebagai alat untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat. Dalam kaitannya dengan pengelolaan sampah berbasis masyarakat, peran masyarakat dapat dikatakan sebagai proses dimana orang sebagai konsumen sekaligus produsen pelayanan persampahan dan sebagai warga mempengaruhi kualitas dan kelancaran prasarana yang tersedia untuk mereka. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah juga telah menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Keterlibatan masyarakat sekitar TPST Mulyoagung Bersatu

ada yang terlibat langsung menjadi pegawai pengelolaan sampah ada juga yang hanya sebagai masyarakat sekitar yang memberikan kontribusi berupa iuran tiap bulannya. Berikut pernyataan dari Bapak Supadi selaku Pengelola TPST Mulyoagung Bersatu, yang mengatakan bahwa:

“adanya pengelolaan sampah berbasis masyarakat ini alhamdulillah juga didukung oleh masyarakat mbak, jadi mulanya masyarakat menolak adanya TPST ini lalu lambat laun mereka menyadari bahwa TPST ini dapat membuktikan fungsinya dalam pengelolaan sampah. Untuk partisipasi masyarakat sendiri ya lumayan mbak, banyak warga sekitar yang menjadi pegawai di TPST ini jadi masyarakat ya juga turut andil dalam pengelolaan sampah disini.” (Wawancara Tanggal 15 April 2018 di TPST Mulyoagung Bersatu).

Ibu Temi selaku pegawai pengelola sampah di TPST Mulyoagung Bersatu juga berpendapat bahwa:

“TPST Mulyoagung bersatu ini semacam memberikan lowongan pekerjaan bagi kita yang kerjanya tidak menentu, pas ada woro-woro adanya TPST ini ya saya berfikir untuk kerja disini karena kan sebelumnya saya juga sudah memilah sampah di TPS sebelumnya jadi taulah mbak sedikit-sedikit tentang bagaimana proses pemilahan sampah, ya jadi saya punya sedikit keahlian mbak *hehe*.” (Wawancara tanggal 13 April 2018 di TPST Mulyoagung Bersatu).

Partisipasi masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui TPST Mulyoagung tidak hanya sebagai pegawai pengelola sampah tetapi bagi masyarakat sekitar yang ada di lingkup Desa Mulyoagung juga turut serta berkontribusi dalam memberikan iuran rutin tiap bulannya, iuran ini dapat dikatakan sebagai pendanaan dalam pengelolaan sampah di TPST Mulyoagung Bersatu, Bapak Supadi selaku Pengelola TPST Mulyoagung Bersatu juga menambahkan bahwa:

“karena kami ada di lingkungan Desa Mulyoagung jadi bagi warga yang tinggal di lingkungan desa sini itu ikut berpartisipasi dengan memberikan iuran tiap bulannya yang nantinya langsung diberikan kepada TPST

Mulyoagung, nantinya iuran dari masyarakat ini digunakan untuk biaya pengelolaan sampah misal nanti uang ini tadi digunakan untuk membeli bensin dan pembiayaan operasional TPST ini juga nanti iuran itu digunakan untuk membiayai gaji pegawai disini dan yang lainnya juga gitu mbak.” (Wawancara Tanggal 13 April 2018 di TPST Mulyoagung Bersatu).

Terkait dengan kontribusi warga berupa iuran sampah bulanan, juga ikut disampaikan oleh Ibu Temi sebagai pegawai di TPST Mulyoagung Bersatu, yakni:

“setau saya warga sekitar ini semacam ditariki uang untuk biaya sampah tiap bulannya gitu mbak, tapi untuk besarnya kalau tidak salah ini sekitar Rp.8.000 – Rp.12.000 perbulan untuk tiap rumahnya. Nah nanti hasil yang diperoleh dari iuran warga ini biasanya diputer lagi itu duitnya sama pengelola TPST Mulyoagung Bersatu, jadi biasanya itu ya digunakan buat bensin kita mungutin sampah, ya gitu-gitu mbak.” (Wawancara Tanggal 13 April 2018 di TPST Mulyoagung Bersatu).

Berdasarkan wawancara diatas dapat dikatakan bahwa keberadaan TPST Mulyoagung Bersatu dapat membantu dalam hal pemberian lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar yang berada di Desa Mulyoagung. Banyaknya pegawai yang ada di TPST Mulyoagung ini dalam hal penggajian didasarkan atas iuran warga sekitar yang diperoleh tiap bulannya. Adapun iuran itu nantinya bukan hanya digunakan untuk gaji pegawai saja tetapi juga untuk pembiayaan operasional pengelolaan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat di TPST ini.

#### **4.3.3 Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Program Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat**

Dengan adanya TPST Mulyoagung Bersatu diharapkan dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat sekitar. Karena tujuan dari dibangunnya TPST Mulyoagung Bersatu ini adalah menanggulangi permasalahan sampah di Desa Mulyoagung. Dengan adanya TPST Mulyoagung Bersatu, masyarakat dapat

mendapat pekerjaan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar mereka. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui program pengelolaan sampah berbasis masyarakat dapat dilihat melalui beberapa indikator berikut:

1. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

TPST Mulyoagung Bersatu yang didirikan dengan tujuan menanggulangi permasalahan sampah di Desa Mulyoagung juga bertujuan memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya. Sebelum memulai operasinya, KSM setempat memberikan pelatihan pengelolaan sampah dan pengenalan lingkungan sehat. Secara tidak langsung dengan dibangunnya TPST Mulyoagung Bersatu dapat menyadarkan masyarakatnya bahwa sampah bukanlah suatu hal yang terus menerus menjadi masalah, namun juga ada solusinya.

Proses Pengelolaan TPST Mulyoagung Bersatu ada beberapa zona, dimana di zona tersebut sampah-sampah tersebut di kategorikan antara zona satu dengan lainnya. Zona itu terdiri dari, zona proses pemilahan kaca atau beling, zona hasil proses pengepakan lapak siap jual, zona proses pemilahan jenis lapak keras, zona hasil limbah nasi, zona pengembangan budi daya peternakan kambing, zona proses pengomposan, zona proses pengepakan pupuk organik. Berikut sesuai dengan pernyataan dari ibu Temi selaku pekerja di TPST Mulyoagung Bersatu:



“sampah yang datang banyak sekali jenisnya mbak, kalau sampah basah banyak sekali nasi, sayur-sayuran, dan buah-buahan yang sudah busuk. Sampah dilimbah ini tidak dibuang, tapi di gunakan untuk pakan babi. Kalau sampah kering di sini berupa dedaunan kering yang di endapkan, ada 3 proses disini mbak, daun kering tadi di campur dengan 1 ton air dan pupuk agar cepat terjadi pembusukan, di endapkan kurang lebih selama 3 bulan agar pembusukan sempurna, dan proses terakhir adalah penggilingan. Pada proses penggilingan dilakukan pemisahan yang pada nantinya akan di pisahkan antara partikel kasar dan halus. Setelah itu di masukkan ke dalam karung yang akan di gunakan sebagai pupuk. Apabila pada proses pembusukan yang terjadi pada daun-daun kering yang di campur dengan kotoran kambing terdapat adanya belatung, biasanya digunakan untuk pakan ikan. Selain itu sampah-sampah berupa botol plastik, kresek, atau gelas-gelas plastik dan kertas atau kardus biasanya akan di kemas yang nantinya akan di gunakan lapak siap jual. Sampah dan limbah yang tidak dapat didaur ulang adalah limbah dari sterofom mbak” (wawancara dengan ibu Temi tanggal 10 April 2018 di TPST Mulyoagung Bersatu).

Pernyataan tersebut membuktikan bahwa pekerja di TPST Mulyoagung Bersatu bisa membuktikan bahwa dirinya berdaya karena dengan adanya keterampilan mereka dalam mengelola sampah sehingga dapat membuat sampah menjadi suatu yang lebih bernilai ekonomis. Dengan lakunya lapak-lapak yang telah mereka jual kepada mitra-mitra yang telah bekerjasama juga dapat meningkatkan pendapatan mereka dan juga memberikan dampak yang positif bagi TPST Mulyoagung Bersatu.

2. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga dilingkungannya.

Dengan adanya TPST Mulyoagung ini telah meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Memang awalnya masyarakat ragu dan takut mendapatkan dampak buruk dengan dibangunnya TPST ini, namun sekarang masyarakat mulai sadar akan pentingnya menjaga lingkungan. Karena masyarakat telah merasakan dampaknya secara langsung. Masyarakat mulai sadar dan mulai tidak membuang sampah disembarang tempat, terutama pada sungai brantas yang dahulu menjadi timbunan sampah di Desa Mulyoagung. Seperti yang disampaikan ibu Temi salah satu pekerja di TPST Mulyoagung sekaligus masyarakat Desa Mulyoagung:

“...sekarang warga disini sudah tidak perlu khawatir lagi mbak buat buang sampah kemana, karena orang-orang kami nanti yang akan mengambil sampah-sampah di setiap bank sampah tiap RT/RW di Desa Mulyoagung sini, Alhamdulillah sudah tidak ada warga yang membuang sampah di sungai walaupun terkadang masih ada beberapa sampah yang kami temukan di pinggiran sungai berantas” (wawancara dengan ibu Temi tanggal 10 April 2018 di TPST Mulyoagung Bersatu)

Dari segi perkembangan perekonomian beberapa warga pengangguran yang ada di Desa Mulyoagung telah terselamatkan dengan adanya TPST Mulyoagung Bersatu. Pasalnya dengan adanya TPST Mulyoagung Bersatu ini dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Desa Mulyoagung. Tujuan dari dibuatnya program Pengelolaan Sampah berbasis masyarakat ini sendiri memang ditujukan untuk memperbaiki keadaan lingkungan di Desa Mulyoagung agar dapat mengelola sampah dengan baik, namun dikatakan berbasis



masyarakat karena memang membutuhkan partisipasi dari masyarakat itu sendiri. TPST Mulyoagung Bersatu telah memberikan dampak ekonomi yang baik bagi masyarakat Desa Mulyoagung, seperti yang disampaikan oleh Ibu Nuryatin pekerja di TPST Mulyoagung sekaligus warga Desa Mulyoagung:

“..saya kebetulan memang nganggur mbak, kerja seadanya saja apa yang bisa saya kerjakan, tapi setelah ada TPST Mulyoagung Bersatu ini saya sangat bersyukur karena jadi pekerjaan tetap saya dan tempat saya belajar mengolah sampah, walaupun gajinya tidak tetap tapi saya sangat terbantu oleh adanya TPST Mulyoagung ini mbak.” (wawancara dengan ibu Nuryatin tanggal 10 April 2018 di TPST Mulyoagung Bersatu)

Dengan adanya TPST Mulyoagung Bersatu ini dapat membuat sebuah lapangan pekerjaan baru. Selain itu Ibu-ibu rumah tangga yang kesehariannya masih ada waktu luang yang cukup banyak dapat menjadikan TPST ini sebagai salah satu sumber peningkatan pendapatan. Jadi dengan adanya TPST Mulyoagung Bersatu secara langsung dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Mulyoagung dan sekitarnya, dengan membaiknya perekonomian masyarakat akan menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat pula. Masyarakat tidak hanya sekedar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga dapat memenuhi kebutuhan sekunder. Berikut sesuai dengan pernyataan ibu Nuryatin pekerja di TPST Mulyoagung Bersatu:

“...setelah saya kerja disini saya mendapatkan penghasilan yang lumayan dapat saya tabung mbak, juga untuk kebutuhan saya Alhamdulillah sudah sedikit-sedikit terpenuhi karena saya

bisa menyisihkan uang gaji saya untuk hal-hal yang saya perlukan, serta ada beberapa pekerja disini yang menjadikan gaji mereka untuk modal sebagai usaha mereka diluar pekerjaan ini mbak” (wawancara dengan Ibu Nuryatin tanggal 10 April 2018 di TPST Mulyoagung Bersatu)

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pemberdayaan dengan tujuan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga dilingkungannya atau bisa dikatakan meningkatkan perekonomian yang diberikan TPST Mulyoagung telah memberikan hasil yang positif untuk meningkatkan pendapatan dan memberikan lapangan pekerjaan terhadap masyarakat Mulyoagung yang bekerja di TPST Mulyoagung Bersatu.

3. Meningkatkan kemandirian kelompok yang ditandai dengan semakin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok.

TPST Mulyoagung Bersatu telah memberikan dampak sosial terhadap masyarakat Desa Mulyoagung. Selain menjadikan pola pikir masyarakat akan sampah menjadi sadar. Adanya TPST Mulyoagung Bersatu ini juga membuat Desa Mulyoagung dikenal oleh masyarakat luas, dengan adanya berbagai kunjungan dari luar daerah dan bahkan luar negeri. Seperti yang diliput *Earth Hour* Malang pada tahun 2016 lalu, mengadakan Kumbang (kumpul belajar bareng). Kumbang yang diikuti oleh *volunteer Earth Hour* Malang, yang diadakan di TPST Mulyoagung Bersatu dengan tujuan mempelajari proses pengelolaan sampah yang baik di TPST Mulyoagung Bersatu.



Gambar 11. Kunjungan dari *Earth Hour* Malang di TPST Mulyoagung Bersatu

*Sumber: Blog Earth Hour Malang*

Proses Pengelolaan di TPST Mulyoagung Bersatu ada beberapa zona, dimana di zona tersebut sampah-sampah tersebut di kategorikan antara zona satu dengan lainnya. Zona itu terdiri dari, zona proses pemilahan kaca atau beling, zona hasil proses pengepakan lapak siap jual, zona proses pemilahan jenis lapak keras, zona hasil limbah nasi, zona pengembangan budi daya peternakan kambing, zona proses pengomposan, zona proses pengepakan pupuk organik. Berikut sesuai dengan pernyataan dari ibu Temi selaku pekerja di TPST Mulyoagung Bersatu:

“sampah yang datang banyak sekali jenisnya mbak, kalau sampah basah banyak sekali nasi, sayur-sayuran, dan buah-buahan yang sudah busuk. Sampah dilimbah ini tidak dibuang, tapi di gunakan untuk pakan babi. Kalau sampah kering di sini berupa dedaunan kering yang di endapkan, ada 3 proses disini mbak, daun kering tadi di campur dengan 1 ton air dan pupuk agar cepat terjadi

pembusukan, di endapkan kurang lebih selama 3 bulan agar pembusukan sempurna, dan proses terakhir adalah penggilingan. Pada proses penggilingan dilakukan pemisahan yang pada nantinya akan di pisahkan antara partikel kasar dan halus. Setelah itu di masukkan ke dalam karung yang akan di gunakan sebagai pupuk. Apabila pada proses pembusukan yang terjadi pada daun-daun kering yang di campur dengan kotoran kambing terdapat adanya belatung, biasanya digunakan untuk pakan ikan. Selain itu sampah-sampah berupa botol plastik, kresek, atau gelas-gelas plastik dan kertas atau kardus biasanya akan di kemas yang nantinya akan di gunakan lapak siap jual. Sampah dan limbah yang tidak dapat didaur ulang adalah limbah dari sterofom mbak” (wawancara dengan ibu Temi tanggal 10 April 2018 di TPST Mulyoagung Bersatu).

Pernyataan tersebut membuktikan bahwa pekerja di TPST Mulyoagung Bersatu bisa membuktikan bahwa dirinya berdaya karena dengan adanya keterampilan mereka dalam mengelola sampah. TPST Mulyoagung tidak akan mendapatkan predikat pengelolaan sampah terbaik hingga mendapatkan kunjungan dari berbagai pihak luar.

#### **4.4 Analisis Data**

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan narasumber yang telah dilaksanakan, maka diambil deskripsi umum tentang temuan dan hasil penelitian yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat desa melalui program pengelolaan sampah berbasis masyarakat, meliputi tentang upaya pemberdayaan masyarakat, keterlibatan *stakeholders*, dan juga hasil pemberdayaan masyarakat melalui program pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Dari hasil temuan tersebut, kemudian peneliti berupaya untuk melakukan analisis hasil dari penelitian yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat desa melalui program pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Analisis ini

dilakukan dengan melihat faktor-faktor dan temuan di lapangan sebagaimana telah dideskripsikan dan membandingkannya dengan teori yang ada dalam pemberdayaan masyarakat desa melalui program pengelolaan sampah berbasis masyarakat di TPST Mulyoagung Bersatu. Kemudian peneliti akan memfokuskan pembahasan sesuai dengan persoalan selanjutnya dari peneliti, yakni bagaimana proses pemberdayaan masyarakat tersebut, serta keterlibatan aktor dan bagaimana hasil dari pemberdayaan masyarakat di TPST Mulyoagung Bersatu.

#### **4.4.1 Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Program Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat**

Saat ini masalah sampah merupakan sebuah permasalahan yang penting yang memerlukan penanganan secara tepat. Pertambahan penduduk yang semakin pesat dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya *volume*, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam penggunaan penggunaan kemasan berupa kertas, plastik, kaleng dan bahan-bahan lainnya masih tinggi. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah timbulan sampah perkotaan di Indonesia dari tahun ke tahun. Namun hal itu tidak diikuti oleh sarana dan prasarana persampahan yang memadai dalam penanganannya, sehingga sampah yang tidak tertangani menjadi salah satu sumber pencemaran lingkungan yang banyak terjadi di wilayah Indonesia.

Faktor lain yang menyebabkan pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh sampah yaitu budaya masyarakat itu sendiri yang kurang peka akan kebersihan lingkungan dan cenderung tidak peduli akan keindahan lingkungan sekitarnya. Faktor dari paradigma masyarakat juga masih banyak yang

beranggapan bahwa sampah hanyalah barang yang sudah tidak bisa dipakai lagi dan tidak mempunyai kegunaan yang berakibat pada menambahnya permasalahan sampah yang semakin pelik dan dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangan kebudayaan dan modernitas masyarakat. Selain itu intensitas konsumsi masyarakat yang semakin tinggi mengakibatkan naiknya produksi sampah baik industri maupun rumah tangga. Sebagai upaya untuk menangani sampah tersebut, perlu dikembangkan metode-metode pengelolaan sampah yang lebih bermasyarakat. Bukan lagi menitikberatkan pada membuang sampah tetapi pada mengelola sampah yang mengakibatkan jumlah sampah di TPA terus meningkat. Hal ini dimulai dengan merubah paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir menjadi paradigma baru pengelolaan sampah yang memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri.

Seiring berjalan waktu dan kemajuan teknologi yang ada sudah banyak metode pengelolaan sampah yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Salah satunya Program Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat. Di Desa Mulyoagung, jenis sampah yang dihasilkan sebagian besar adalah sampah rumah tangga yang terdiri dari sisa sayuran, makanan, plastik, kertas, botol dan sisa-sisa kemasan. Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat serta memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat.



### **a. Bantuan Dana sebagai Modal Usaha**

Program Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat merupakan upaya pemberdayaan yang dilakukan pemerintah untuk masyarakat. Dalam pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu dibutuhkan modal yang tidak sedikit, oleh sebab itu masyarakat terutama pada masyarakat pedesaan yang pendapatannya relative tergolong menengah kebawah dan belum melihat keberhasilan dari Program akan tidak mau atau tidak mampu untuk memulai Program. Pengertian Modal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merujuk pada uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melapas uang, dan sebagainya, yang dapat digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan. Sumodiningrat (1999: 7) menyatakan bahwa diantara bermacam asset produksi, yang paling mendasar adalah akses kepada dana. Tersedianya injeksi dana yang memadai dapat menciptakan pembentukan modal bagi usaha rakyat. Sehingga, dapat meningkatkan produksi, pendapatan, dan menciptakan tabungan yang dapat digunakan untuk pemupukan modal secara berkesinambungan.

Program Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat pada dasarnya hampir sama seperti sebuah industri, yang membutuhkan bantuan modal relatif banyak dan keterbatasan modal akan menghambat program Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat. Modal yang dibutuhkan adalah modal yang berasal dari Pemerintah. Pada dasarnya TPST Mulyoagung Bersatu dibuat memang untuk memberdayakan masyarakat setempat agar menjadi lebih mandiri dan mendapatkan pekerjaan tetap. Namun permasalahan modal akan menjadi kelemahan dan hambatan



tersendiri bagi perkembangan dan kelanjutan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat itu sendiri. Karena keterbatasan modal bisa menyebabkan tidak berjalannya suatu program tersebut.

Namun pada program Pengelolaan sampah berbasis masyarakat ini, Pemerintah Kabupaten Malang dan Pemerintah Desa selaku pemberdaya dalam program ini sudah berkontribusi dalam memberikan bantuan dana sebagai modal. Pemerintah Kabupaten sendiri telah memberikan modal untuk pembangunan TPST Mulyoagung Bersatu. Pemerintah Desa memberikan bentuk swadaya yaitu berupa lahan, jadi dapat dikatakan kontribusi daripada pemerintah memang ada dan memadai walaupun tidak berbentuk uang. Dengan bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa, program pengelolaan sampah berbasis masyarakat dapat berjalan dan beroperasi sebagaimana mestinya. Dan dengan perkembangannya, TPST Mulyoagung telah mendapat banyak bantuan pembangunan dari Pemerintah Kabupaten dan Desa maupun dari pihak luar.

#### **b. Pembangunan Prasarana sebagai Pendukung Pengembangan Sosial Ekonomi Rakyat**

Pengertian prasarana Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sehingga prasarana merupakan suatu hal yang penting bagi sebuah program. Tanpa adanya prasarana yang diberikan oleh pemerintah, suatu program tidak akan bisa dimulai. Prasarana yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang serta Pemerintah Desa

Mulyoagung sudah lebih dari cukup. Apalagi ditambahkan sarana prasarana dari pihak dinas dan swasta yang juga membantu memfasilitasi jalannya Program Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, prasarana yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Desa telah membuat berhasilnya program pengelolaan sampah itu sendiri. Karena fungsi dari prasarana ini sendiri adalah sebagai pendukung pengembangan sosial ekonomi rakyat. Dengan prasana yang telah memadai untuk dibangun dan dilaksanakannya program pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Desa Mulyoagung, perekonomian masyarakat setempat telah terangkat dan TPST Mulyoagung telah menjadi lahan pekerjaan bagi masyarakat Desa Mulyoagung. Prasarana yang berbentuk fisik memang lebih dibutuhkan dan lebih menguntungkan bagi pihak TPST Mulyoagung.

**c. Penyediaan Sarana untuk Memperlancar Pemasaran Hasil Produksi dan Jasa Masyarakat**

Pelaksanaan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat tidak akan terwujud apabila tidak adanya dukungan dari pemerintah, sarana merupakan suatu hal yang harus disediakan oleh pemerintah untuk memperlancar program tersebut. Apalagi program yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat. Sumodiningrat (1999: 36) menyampaikan bahwa demi meningkatkan pemerataan pembangunan, pemerintah perlu mengerahkan pemerataan sarana demi mendorong berhasilnya suatu program. Sarana untuk memperlancar pemasaran hasil produksi dan masyarakat memang sangat dibutuhkan. Dalam hal ini

pemerintah dituntut memberikan sarana bagi masyarakat agar menjalankan program sesuai dengan tujuan dari pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa sarana pada TPST Mulyoagung Bersatu dirujuk pada sarana yang diperuntukkan untuk memperlancar pemasaran hasil produksi dan jasa masyarakat. Bentuk pemberian sarana dari pemerintah untuk TPST Mulyoagung adalah seperti Motor Tossa, *Truck* pengangkut sampah, dan alat transportasi lainnya yang dapat digunakan sebagai sarana pengambilan sampah. Sarana dalam bentuk untuk memperlancar pemasaran hasil produksi adalah dengan dilengkapinya mesin penjahit karung, mesin penggiling untuk proses pengepakan sampah yang siap jual. Sehingga sarana yang diberikan pemerintah merupakan sarana yang memang untuk memperlancar proses pemasaran di TPST Mulyoagung Bersatu.

#### **d. Pelatihan Bagi Aparat dan Masyarakat**

Pelatihan dilakukan untuk pembekalan suatu program agar terlaksananya program dari pemerintah sesuai sasaran dan tujuan. Menurut Sumodiningrat (1999: 22) aparat merupakan pemerintah yang terkait dalam proses pembangunan sejak dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan tingkat pusat. Aparat yang masuk dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui program pengelolaan sampah berbasis masyarakat ini adalah Pemerintah Desa yang secara langsung menjadi koordinator dari TPST Mulyoagung Bersatu.

Pelatihan yang dilaksanakan Lembaga Swadaya Masyarakat pada awal pembangunan TPST Mulyoagung Bersatu ini dilakukan dan ditujukan kepada pekerja TPST Mulyoagung yang resmi bekerja di TPST Mulyoagung Bersatu

untuk pengenalan metode pengelolaan sampah berbasis masyarakat, pengenalan terhadap lingkungan bersih dan upaya metode pengelolaan sampah berbasis 3R. Pelatihan ini dilakukan untuk mengembangkan potensi masyarakat dalam penanganan pengelolaan sampah. Pelatihan hanya dilakukan sekali di awal pembentukan TPST Mulyoagung Bersatu. Sehingga masyarakat yang mengetahui program dan pengenalan pengelolaan sampah berbasis masyarakat ini hanya beberapa masyarakat saja.

Berdasarkan hasil penelitian ini, pelatihan atau sosialisasi yang dilakukan dianggap kurang karena tidak adanya pengulangan sosialisasi untuk masyarakat masa kini yang belum mengetahui pengelolaan sampah berbasis masyarakat serta metode 3R. TPST Mulyoagung hanya membuka pelatihan bagi instansi/pihak luar yang ingin belajar di TPST Mulyoagung.

#### **e. Penguatan Kelembagaan**

Sumodiningrat (1999: 150) menyampaikan bahwa salah satu unsur penting dari pembangunan yang berbasis daerah adalah kemantapan kelembagaan. Keberadaan lembaga atau organisasi di dalam sebuah masyarakat adalah untuk memfasilitasi masyarakat dan memberikan kemudahan bagi mereka dalam melakukan akses-akses yang diinginkan, seperti permodalan, media musyawarah dan lain sebagainya. Kelembagaan yang berhubungan dengan TPST Mulyoagung Bersatu adalah Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa.

Sebagai wadah dari masyarakat untuk melakukan akses-akses yang diinginkan, maka sebuah lembaga atau organisasi harus ada upaya untuk

melakukan penguatan. Program yang jelas dan adanya kesadaran dari berbagai pihak yang terlibat akan mengantarkan keberhasilan dari sebuah program.

Berdasarkan hasil dari wawancara dan observasi dalam penelitian ini, penguatan kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat melalui program pengelolaan sampah berbasis masyarakat dapat dikatakan pemerintah Desa merupakan lembaga penopang yang kuat dalam memberikan dorongan dan fasilitas demi berjalannya program pengelolaan sampah berbasis masyarakat tersebut.

#### **4.4.2 Peran *Stakeholder* yang Terlibat dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di TPT Mulyoagung Bersatu**

Pemberdayaan masyarakat tidak terlepas dari kontribusi dan keterlibatan masing-masing aktor yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Menurut Ambar Teguh Sulistyani (2004:97) menjelaskan peran tiga aktor dalam pemberdayaan yakni diantaranya:

**Tabel 7. Tiga Aktor dalam Pemberdayaan Masyarakat**

<b>Aktor</b>	<b>Peran dalam Pemberdayaan</b>	<b>Bentuk Output Peran</b>	<b>Fasilitas</b>
Pemerintah	Formulasi dan Penetapan Policy, Implementasi Monitoring dan Evaluasi	Kebijakan: Politik, Umum, Khusus/Departemental/Sektoral Penganggaran, Juknis dan Juklak, Penetapan indikator keberhasilan peraturan hukum, penyelesaian pemeliharaan	Dana, Jaminan alat, teknologi, network, sistem manajemen, informasi,

<b>Aktor</b>	<b>Peran dalam Pemberdayaan</b>	<b>Bentuk Output Peran</b>	<b>Fasilitas</b>
	Mediasi		edukasi
Swasta	Kontribusi pada formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi	Konsultasi dan Rekomendasi Kebijakan, tindakan dan langkah/policy action, implementasi, donatur, private investment, pemeliharaan	Dana, alat, teknologi tenaga ahli dan sangat terampil
Masyarakat	Partisipasi dalam formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi	Saran, imput, kritik, rekomendasi, keberatan, dukungan dalam formulasi kebijakan, policy action, dana swadaya menjadi obyek, partisipasi, pelaku utama/subjek menghidupkan fungsi kontrol sosial	Tenaga terdidik tenaga terlatih, setengah terdidik dan setengah terlatih.

Pemberdayaan masyarakat pada proses pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui TPST Mulyoagung Bersatu juga tidak terlepas dari keterlibatan aktor dalam pemberdayaan masyarakat. Ketiga aktor tersebut yakni pemerintah mulai dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah desa Mulyoagung, swasta dan masyarakat sekitar TPST Mulyoagung Bersatu. Berikut penjelasan terkait keterlibatan aktor dalam pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di TPST Mulyoagung Bersatu berdasarkan Teori Sulistyani (2004:97), yakni:

## 1. Pemerintah

Pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat yakni sebagai aktor primer yakni pemerintah memiliki fungsi sebagai regulator terhadap jalannya suatu kegiatan terkait dengan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Pemerintah menjadi aktor terpenting karena pemerintahlah yang lebih banyak berperan sebagai pembuat landasan hukum dan acuan dalam pengelolaan sampah yang nantinya akan menjadi suatu pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Sulistyani (2004:97) memetakan peran tiga aktor kedalam tabel, pemerintah lebih banyak berperan pada penentu rambu-rambu dan aturan main secara umum, peran pemerintah yang paling menonjol terletak pada pengambilan keputusan dan pendanaan, penyediaan sistem informasi yang baik, program edukasi masyarakat yang tepat, menetapkan pola monitoring dan evaluasi.

Dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah berbasis masyarakat di TPST Mulyoagung Bersatu, pemerintah berperan sebagai regulator atau pembuat kebijakan yang menjadi dasar dalam pengelolaan sampah di TPST Mulyoagung. Pemerintah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan sampah pada TPPST ini. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dsara yang selanjutnya akan diterjemahkan oleh masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur setiap kegiatan pelaksanaan pemberdayaan di lingkup masyarakat. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti yterkait dengan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah berbasis masyarakat di TPST Mulyoagung Bersatu terdapat



kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai acuan dalam pembuatan TPST dan pengelolaan sampah. Kebijakan yang dijadikan dasar pengelolaan sampah di TPST Mulyoagung Bersatu adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sampah, Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, serta Peraturan Desa Mulyo Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) untuk menuju Desa Mulyo Agung yang Bersih, Sehat dan Bermutu.

Kemudian selain berperan menjadi regulator, pemerintah juga menjalankan perannya berperan sebagai fasilitator. Peran pemerintah sebagai fasilitator dalam rangka pengelolaan sampah berbasis masyarakat di TPST Mulyoagung Bersatu yakni dengan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Pemerintah mewujudkan perannya sebagai fasilitator dengan memfasilitasi TPST Mulyoagung dengan pemeberian sarana dan prasarana seperti hanggar, mesing jahit karung, truck ELF, unit pompa air, pagar, hewan ternak, paving halaman, motor tossa sebagai pengangkut sampah, mesin mixer pupuk, keranjang kompos, mesin perajang gelas, roll jaring paranet, kolam permanan beton, perbaikan jembatan dan jalan tembus dukuh, pembuatan ruang pertemuan, dan tidak lupa pemerintah mencoba memfasilitasi kesehatan dari pegawai di TPST Mulyoagung bersatu.

Banyaknya jumlah bantuan yang diberikan oleh pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah berbasis masyarakat di TPST Mulyoagung Bersatu belum dapat dikatakan peran pemerintah telah

optimal. Partisipasi pemerintah tampaknya kurang optimal dikarenakan bahwa pemerintah kurang memberikan sosialisasi terkait pengelolaan sampah contohnya pendampingan dan pelatihan bagi pegawai yang masih belum dilakukan oleh pemerintah, kontrol dan pengawasan juga yang masih terbatas, serta keterbatasan dana sebagai pengoperasionalisasin TPST yang masih belum diberikan oleh pemerintah hal ini terbukti dari dalam kegiatan pengelolaan sampah di TPST Mulyoagung bersatu untuk pendanaannya semua hasil dari swadaya masyarakat sekitar TPST ini. Tidak adanya pendampingan dan pelatihan oleh pemerintah juga dirasa dapat mengganggu jalanya pengelolaan sampah di TPST ini, karena secara umum dapat dikatui bahwa pegawai di TPST ini semuanya belajar mengenai proses penegelolaan sampah secara otodidak tanpa adanya pelatihan yang diberikan oleh pemerintah. Dalam hal kontrol dan pengawasan yang dilakukan juga kurang karena pemerintah seutuhnya menyerahkan kegiatan secara operasional kepada TPST, seharusnya kontrol dan pengawasan dilakukan secara rutin untuk memantau perkembangan dari pemeberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah berbasis masyarkat di TPST Mulyoagung Bersatu. Tujuannya adalah agar apabila masyarakat yang melalkukan kegiatan ini mengalami hambatan, pemerintah mengetahui dan terus mendampingi.

## 2. Swasta

Selain pemerintah, juga terdapat keterlibatan pihak swasta dalam pemberdayaan masyarakat. Swasta menjadi mitra dari pemerintah yang mana pihak swasta juga dapat memberikan bantuan yang bermanfaat dalam

pemberdayaan masyarakat. Sulistyani (2004:99) menjelaskan bahwa swasta mengambil peran lebih banyak pada implementasi penentu langkah/ policy action bersama masyarakat. Peran swasta dalam pemberdayaan masyarakat juga mencakup kontribusi dana melalui investasi swasta yang bermanfaat untuk mendukung pemberdayaan masyarakat. Dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah berbasis masyarakat di TPST Mulyoagung Bersatu dapat dilihat adanya kontribusi dari swasta.

Peran swasta dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah berbasis masyarakat di TPST Mulyoagung Bersatu adalah melalui Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) atau yang lebih dikenal CSR. Salah satunya yakni CSR dari Australia yang memberikan sejumlah bantuan berupa sarana dan prasarana untuk pengelolaan sampah berbasis masyarakat di TPST Mulyoagung Bersatu pada tahun 2011. Seperti yang telah dijabarkan di atas, bahwa bentuk keterlibatan dari CSR Australia dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat di TPST Mulyoagung berupa hanggar untuk tahap ke 2 di TPST dengan anggaran Rp. 100.000 yang diwujudkan kedalam hanggar 12mx12m. Pihak lain yang memberikan bantuan yakni LSM yang memberikan bantuan berupa pelatihan awal bagi pegawai dengan tema “metode 3R dan pengenalan lingkungan bersih”. Pelatihan ini diberikan dalam rangka pengenalan proses pengelolaan sampah di TPST Mulyoagung Bersatu.

### 3. Masyarakat

Proses pemberdayaan masyarakat tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat dalam hal ini partisipasi masyarakat terhadap suatu kegiatan. kepentingan

masyarakat menjadi salah satu yang merubah pola pikir masyarakat mengenai pemberdayaan masyarakat. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat agar berkemampuan untuk memberikan ide, kritik dan sebagainya perlu adanya proaes edukasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat dimulai dari partipasi mereka dalam pemberdayaan masyarakat dengan dijadikannya mereka sebagai subjek dan objek dari pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah. Peran lain masyarakat yang dapat digali dan dikembangkan adalah pendanaan. Partisipasi dibidang pendanaan merupakan potensi internal yang dimiliki oleh masyarakat. Sulistyani (2004:100) menjelaskan bawa seacara umum peran masyarakat diberikan dalam bentuk partisipasi baik pada level formulasi, implementasi, monitoring maupun evaluasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah.

Pada pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah berbasis masyarakat di TPST Mulyoagung bersatu dapat dilihat bahwa bentuk partisipasi masyarakat mulai keterlibatan mereka menjadi pegawai di TPST tersebut sampai dengan pemberian dana iuran bulanan oleh masyarakat sekitar TPST MulyoAgung Bersatu. Keterlibatan masyarakat menjadi pegawai TPST hampir tiap tahunnya mengalami kenaikan sehingga dalam hal ini dapat diketahui bahwa masyarakat memiliki kemauan untuk menjad pegawai di TPST. Bagi masyarakat yang tidak menjadi pegawai dari TPST, memberikan bantuan berupa dana swadaya masyarakat tiap bulannya dengan jumlah Rp. 8.000 – Rp. 12.000 per KK. Nantinya dana yang diperoleh dari iuran masyarakat akan digunakan untuk membiayai operasional sehari-hari pengelolaan sampah di TPST Mulyoagung

Bersatu, mulai dari pembiayaan bensin sampai pada biaya gaji pegawai TPST Mulyoagung Bersatu.

#### **4.4.3 Hasil Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Program Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat**

TPST 3R Mulyoagung Bersatu setiap harinya mengolah sekitar 133 m<sup>3</sup> sampah. Pengangkutan sampah dari rumah warga setiap harinya dilakukan satu kali pada pagi hari. Di TPST 3R Mulyoagung Bersatu ini terdiri dari 5 zona. Pertama, zona pemilahan awal dimana sampah yang datang kemudian dipilah terlebih dahulu. Kemudian zona pemackingan. Untuk zona ketiga adalah *composting*, dan zona keempat adalah peternakan kambing dan perikanan. Sedangkan zona terakhir adalah administrasi. Sampah dari warga yang masuk ke TPST 3R Mulyoagung Bersatu diawali dengan proses pemilahan. Proses pemilahan dikategorikan berdasarkan bahannya (kantong/botol plastik, kertas/kardus, sisa makanan, kaca, dan besi). Setelah proses ini, sampah-sampah tadi dipilah kembali berdasarkan warnanya. Sampah-sampah yang telah melewati proses pemilahan akan dikemas dengan cara dimasukkan ke dalam karung ataupun dipress secara manual atau mesin lalu kemudian dijual ke pembeli/pengepul. Saat ini ada lima mitra yang bekerja sama untuk mengambil sampah yang telah dipilah.

Program 3R didasarkan pada konsep pemanfaatan limbah atau sampah yang sudah tidak digunakan oleh masyarakat, oleh karena itu program 3R dilaksanakan agar masyarakat dapat mengelola sampah agar tidak terbuang percuma. Melalui program itu diharapkan terjadi peningkatan taraf hidup

masyarakat kelurahan yang terkategori tidak mampu. Desa Mulyoagung juga melakukan dukungan-dukungan dimana masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraannya, juga melakukan pemanfaatan dan pengolahan terhadap sampah yang selalu bertambah setiap harinya. Hal inintentu saja untuk mengimbangi jumlah sampah yang menjadi masalah utama masyarakat, pemberdayaan masyarakat kelurahan diarahkan pada pengelolaan sampah. Peran serta Pemerintah Desa terhadap program pengelolaan sampah berbasis masyarakat sangat dipengaruhi dari dukungan yang diberikan artinya semakin besar dukungan yang diberikan pemerintah maka semakin tinggi keinginan masyarakat untuk melaksanakan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat itu sendiri.

Tujuan akhir pemberdayaan adalah adanya peningkatan pendapatan Indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah proses seringkali diambil dari tujuan sebuah pemberdayaan yang menunjukkan pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial. Sedangkan indikator keberhasilan program menurut Sumodiningrat (1999) yang dipakai untuk mengukur pelaksanaan program-program dari sebuah pemberdayaan masyarakat pada TPST Mulyoagung Bersatu sebagai berikut:

1. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

Dengan memanfaatkan sampah yang biasanya dianggap “hina” oleh masyarakat, TPST Mulyoagung Bersatu ini dapat membuktikan bahwa sampah juga dapat mempunyai nilai ekonomis. Ditambah

dengan mengelola sampah tersebut nilai sampah tersebut semakin lebih tinggi. Dengan berhasilnya menjual lapak yang bernilai karena proses daur ulang dalam pengelolaan sampah di TPST Mulyoagung Bersatu, peningkatan pendapatan telah berhasil dibuktikan karena dengan lakunya lapak-lapak yang dihasilkan, peningkatan pendapatan atau gaji pokok pegawai akan bertambah.

2. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga dilingkungannya.

TPST Mulyoagung Bersatu mengajak masyarakat sadar bahwa untuk meningkatkan pendapatan dapat dilakukan dengan memanfaatkan apa yang ada disekitar (dalam hal ini sampah). Hal ini terbukti dengan banyaknya masyarakat yang bekerja di TPST Mulyoagung Bersatu selain untuk menjadikan pekerjaan tetap, namun juga ingin menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

3. Meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan semakin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok.

Dibuktikan dengan banyaknya kunjungan ke TPST Mulyoagung untuk melakukan pelatihan, membuktikan bahwa pekerja di TPST Mulyoagung telah mandiri dan menunjukkan kemampuannya dalam pengelolaan sampah.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Program Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat dapat disimpulkan:

1. Upaya Pemberdayaan masyarakat Desa melalui program pengelolaan sampah berbasis masyarakat di TPST Mulyoagung Bersatu dengan Upaya pemberdayaan sebagai berikut:

- a. Bantuan dana sebagai modal usaha.

Dengan bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa, program pengelolaan sampah berbasis masyarakat dapat berjalan dan beroperasi sebagaimana mestinya. Dan dengan perkembangannya, TPST Mulyoagung telah mendapat banyak bantuan pembangunan dari Pemerintah Kabupaten dan Desa maupun dari pihak luar.

- b. Pembangunan prasarana sebagai pendukung pengembangan sosial ekonomi masyarakat.

Prasana yang telah memadai untuk dibangun dan dilaksanakannya program pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Desa Mulyoagung, perekonomian masyarakat setempat telah terangkat dan

TPST Mulyoagung telah menjadi lahan pekerjaan bagi masyarakat Desa Mulyoagung.

- c. Penyediaan Sarana untuk Memperlancar Pemasaran Hasil Produksi dan Jasa Masyarakat.

Penyediaan sarana yang diberikan pemerintah bagi masyarakat atau pekerja di TPST Mulyoagung Bersatu sudahlah cukup mendukung karena alat yang disediakan sesuai dengan kebutuhan demi memperlancar berjalannya produksi di TPST Mulyoagung Bersatu.

- d. Pelatihan Bagi Aparat dan Masyarakat.

Pelatihan yang dilaksanakan Lembaga Swadaya Masyarakat pada awal pembangunan TPST Mulyoagung Bersatu ini dilakukan dan ditujukan kepada pekerja TPST Mulyoagung yang resmi bekerja di TPST Mulyoagung Bersatu untuk pengenalan metode pengelolaan sampah berbasis masyarakat, pengenalan terhadap lingkungan bersih dan upaya metode pengelolaan sampah berbasis 3R.

- e. Penguatan Kelembagaan.

Penguatan kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat melalui program pengelolaan sampah berbasis masyarakat dapat dikatakan pemerintah Desa merupakan lembaga penopang yang kuat dalam memberikan dorongan dan fasilitas demi berjalannya program pengelolaan sampah berbasis masyarakat tersebut.

2. Peran *Stakeholder* yang Terlibat dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di TPST Mulyoagung Bersatu.

Dalam program pengelolaan sampah berbasis masyarakat ini peran dari pemerintah cukup baik, pemerintah Kabupaten maupun Desa. Masing-masing memberikan perannya dengan memberikan bantuan yang sesuai dan memadai, namun untuk bekal terhadap para pekerja di TPST Mulyoagung Bersatu dirasa kurang karena tidak adanya control dan pengawasan dari pemerintah secara langsung untuk melihat proses pengoperasian sampah itu sendiri.

3. Hasil Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Program Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat dengan menggunakan indikator keberhasilan sebagai berikut
  - a. berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
  - b. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga dilingkungannya
  - c. Meningkatkan kemandirian kelompok yang ditandai dengan semakin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok.

Dapat disimpulkan bahwa bantuan dari pemerintah untuk pembangunan TPST Mulyoagung ini memang difasilitasi oleh

pemerintah, namun pemberdayaan yang dilakukan pemerintah dapat dibidang sangat kurang, karena pemerintah hanya berfokus pada pembangunan TPST Mulyoagung Bersatu saja dan proses pengelolaannya, namun untuk pelatihan, pembekalan serta pendidikan bagi masyarakat setempat yang mana harus diberdayakan agar mendukung jalannya program ini, pemerintah dirasa kurang memberikan pemberdayaan langsung kepada masyarakat setempat sehingga pemberdayaan yang dilakukan melalui program pengelolaan sampah berbasis masyarakat ini dianggap tidak berhasil. Walaupun dampak ekonomi memang memberikan dampak yang sangat baik bagi beberapa masyarakat yang bekerja di TPST Mulyoagung Bersatu.

## 5.2 SARAN

Berdasarkan pembahasan dan temuan lapang dalam penelitian ini, maka penelitian ini berpengharapan terhadap pemberdayaan masyarakat melalui program pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan mengajukan beberapa saran di bawah ini:

1. Kurangnya pemberian modal di awal pembangunan TPST. Pemerintah hanya memberikan pembangunan berpa fisik sehingga program akan berjalan menunggu selesainya oembangunan tersebut. Apabila pemerintah

memberikan modal berupa uang. Pemerintah desa pasti bisa membangun TPST dengan cepat tanpa menunggu pembangunan dari pemerintah.

2. Perlunya sosialisasi untuk masyarakat agar lebih mengenal apa metode pengelolaan sampah berbasis masyarakat itu sendiri. Karena sosialisasi yang dilakukan hanyalah sekali dan tidak menyeluruh ke semua warga Desa Mulyoagung melainkan kepada Pekerja TPST Mulyoagung Bersatu saja. Jadi diharapkan adanya sosialisasi lanjutan untuk para warga Desa ulyoagung agar lebih mengenal program pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan metode 3R.
3. Diharapkan ada Pelatihan daur ulang dari pihak TPST Mulyoagung atau KSM setempat bagi pekerja di TPST Mulyoagung yang mungkin dapat menjadi inovasi dari lapak-lapak yang dijual agar dapat dijadikan kerajinan tangan yang juga tidak keluar dari konteks dauar ulang sampah yang mungkin bisa menjadi inovasi baru untuk daur ulang sampah di TPST Mulyoagung.
4. Diharapkan adanya pelatihan kesadaran masyarakat agar dapat membantu proses pengelolaan sampah di TPST Mulyoagung Bersatu, bukan hanya memberikan kontribusi berupa uang saja. Seperti pembuatan kompos yang dilakukan di TPST Mulyoagung Bersatu diwajibkan untuk masyarakat membeli hasil pembuatan kompos itu tadi, dan masih banyak yang lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Ali, Moh, Suhartini, Rr, Halim, A, 2005, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi*, Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Nusantara
- Huraerah, Abu. 2008. *Pengorganisasian Dan Pengembangan Masyarakat. Model Dan Strategi Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung : Humaniora, Penerbit Buku Pendidikan – Anggota IKAPI.
- Affifudin, 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan(konsep, Teori dan Aplikasinya di Era Reformasi)*. Alfabeta. Bandung
- Wijaya, Azmi. 2011. *Upaya Pemerintahan Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin untuk Meningkatkan Kesejahteraan (Studi Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Desa Sungai Rujing, Kecamatan Sangka Pura)*. Malang. Skripsi Universitas Brawijaya
- Pasalong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung. ALDABETA.
- Fahrudin, Adi, *Pemberdayaan, Partisipasi, dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*, Bandung: Humaniora
- Kuncoro, Mudrajat. 2003. *Ekonomi Pembangunan : Teori Masalah dan Kebijakan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta. UPP AMP YKPN
- Mardikanto, Soebianto. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung. ALFABETA.
- Kartasmita, G, 1996, *Pembangunan untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo.
- Jayadinata, 2006. *Pembangunan Desa Dalam Perencanaan*. Bandung. ITB
- Widjaja, H.A.W. 2003 *Otonomi Desa*, Jakarta: PT . Raja Grafindo Persada
- Suhendra, K, 2006, *Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Yogyakarta. Gava Media.

- Suharto, Edi. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung. Refika Aditama.
- Mardikanto, Soebianto. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung. ALFABETA.
- Iqbal, M. 2007. *Analisis peran pemangku Kepentingan dan Implementasinya dalam Pembangunan Pertanian*. Jurnal Litbang Pertanian, 26(3) :89-99
- Bryson, John M. 2003. *What To Do When Stakeholder Matter: A Guide to Stakeholder Identification and Analysis Techniques*. A Paper Presented at The London School of Economics and Political Sciercer
- Gilbert M, Prihanto D, dan Suprihatin A, 1996. *Konsep Pendidikan Lingkungan Hidup dan " Wall Chart "*. Buku Panduan Pendidikan Lingkungan Hidup, PPPGT/VEDC, Malang.
- Bungin, burhan.2001. *Metodologi Penelitian kualitatif*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Cresswell, John W, 2016. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*.Edisi Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moleong, 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung:PT Remaja Rosdakarya.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (ed.revisi), Bandung: PT Rosda Karya.
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung; PT. Refika Aditama.
- Jonathan, Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Pranarka. A.M.W., dan Vidhyandika, 1996, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, diedit oleh: Onny S.P. dan Pranarka. Jakarta: *Center of Strategic and International Studies*.
- Sumodiningrat, G, 2000, *Visi dan Misi Pembangunan Pertanian Berbasis Pemberdayaan*, Yogyakarta: IDEA.
- Sumardjo. 1999. *Transformasi Model Penyuluhan Pertanian Menuju Pengembangan Kemandirian Petani: Kasus di Propinsi Jawa Barat*. Disertasi Doktor. Bogor: Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.



Slamet M. 2003. Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan. IPB Press. Bogor.

Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Refika Aditama, 2005)

Suwitri, Sri. 2009. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

SURAT EDARAN Nomor. SE.1/Menlhk-Setjen/Rokum/PLB.3/1/2017 tentang pelaksanaan peringatan hari peduli sampah nasional tahun 2017

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Internet :

Agung P Sandi. Makalah tentang Sampah.  
<http://agungpsandi27.blogspot.co.id/2014/09/contoh-makalah-tentang-sampah.html>  
diakses pada tanggal 20 Januari 2018

Tabloid Jawa Timur. Visi Kabupaten Malang. <https://tabloidjawatimur.com/visi-kabupaten-malang-terwujudnya-kabupaten-malang-yang-madep-manteb-manetep/>  
diakses pada tanggal 9 April 2018

Blog Desa Mulyoagung <http://desamulyoagung.blogspot.co.id/p/gambaran-umum.html>  
diakses pada tanggal 9 April 2018

Sainskompas.com. banjir di Jakarta terbukti gara-gara sampah.  
<https://sains.kompas.com/read/2014/01/20/0759227/Banjir.Jakarta.Terbukti.gara-gara.Sampah>. diakses pada tanggal 14 Mei 2018

Encep Amir. Statistik Sampah. <http://sampahmasyarakat.com/2016/03/21/statistik-sampah/> diakses pada tanggal 1 Mei 2018

Dian Ayu Antika Hapsari. Wow Produksi Sampah Kabupaten Malang mencapai 400 ribu ton.  
<https://malangvoice.com/wow-produksi-sampah-kabu-malang-capai-400-ribu-ton-per-tahun/> diakses 1 Mei 2018

Adriarani. Desa Mulyoagung : Sampah Menjadi Berkah.

<http://adriarani.blogspot.co.id/2014/05/desa-mulyo-agung-sampah-menjadi-berkah.html>

diakses pada tanggal 1 Mei 2018

TPST Mulyoagung Bersatu blogspot. [http://tpst-](http://tpst-mulyoagungbersatu.blogspot.co.id/p/rencana-pengembangan.html)

[mulyoagungbersatu.blogspot.co.id/p/rencana-pengembangan.html](http://tpst-mulyoagungbersatu.blogspot.co.id/p/rencana-pengembangan.html) diakses pada 1 Mei 2018

Earth Hour Malang blogspot. [http://earthhourmalang.blogspot.co.id/2016/04/kunjungan-](http://earthhourmalang.blogspot.co.id/2016/04/kunjungan-earth-hour-malang-di-tpst-3r.html)

[earth-hour-malang-di-tpst-3r.html](http://earthhourmalang.blogspot.co.id/2016/04/kunjungan-earth-hour-malang-di-tpst-3r.html) diakses pada 10 Mei 2018



## LAMPIRAN

## 1. Daftar Pekerja di TPST Mulyoagung Bersatu

No	Nama	Alamat
1	Tugas S.	Jl. Raya Dermo No. 46 RT 02 RW 01 Dermo, Mulyoagung
2	Harsono	Jl. Mulyodadi No. 38 RT 01 RW 01 Jetak Lor, Mulyoagung
3	Tukiran	Jl. Mulyodadi No. 84 RT 01 RW 02 Jetak Lor, Mulyoagung
4	Bobby	Jl. Raya Dermo No. 52 RT 01 RW 02 Dermo, Mulyoagung
5	Tupan	Lumajang
6	Agung	Jl. Mulyodadi No. 38 RT 01 RW 01 Jetak Lor, Mulyoagung
7	Sungkono	Jl. Mawar Betek Kota Malang
8	Edi	RT 18 RW 06 Pandanrejo, Dsn Nragi, Wagir
9	Wawan	Jl. Klayatan 3 Gang teratai No. 26 Sukun
10	Sumarto	Ds. Kucur Kecamatan Dau
11	Sutrisno	Jl. Mulyoagung No. 62 RT 01 RW 02 Jetak Lor, Mulyoagung
12	Syarif	Jl. Mulyodadi No. 92 RT 02 RW 02 Jetak Lor Mulyoagung
13	M. Sahrudin	Jl. Mulyodadi No. 08 RT 01 RW 02 Jetak Lor, Mulyoagung
14	Miskan	Banjar Tengah Desa Sumbersekar Kec. Dau
15	Roni	Jetis, Mulyoagung
16	Amir	Landungsari, Dau
17	abig	Jl. Klayatan 3 Gang Teratai No 26, Sukun
18	Tiko	Jl. Soekarno Hatta Kota Malang
19	Johan	Junrejo, Batu
20	Adi	Jl. Mulyodadi No. 92 RT 02 RW 02 Jetak Lor Mulyoagung
21	Hendra	Probolinggo
22	Nuriatin	Jl. Dahlia RT 01 RW 07 Sengkaling
23	Yuliana	Jl. Raya Dermo RT 01 RW 01 Mulyoagung
24	Rupi'ani	Jetis, Mulyoagung
25	Meseni	Jl. Raya Dermo RT 01 RW 01, Mulyoagung
26	Minah	Jl. Raya Dermo RT 01 RW 02, Mulyoagung
27	Rusmini	Jl. Raya Dermo RT 04 RW 01, Mulyoagung
28	Li'ati	Jl. Mulyodadi No 84 RT 02 RW 02 Jetak Lor
29	Elfi	Jl. Raya Dermo RT 04 RW 01, Mulyoagung
30	Temi	Jl. Mulyodadi RT 01 RW 01, Mulyoagung
31	Siti	Jl. Raya Dermo RT 04 RW 01, Mulyoagung
32	Lina	Princi, Gading Kulon, Dau
33	Tuni	Desa Sumbersekar, Dau
34	Susilowati	Jetis, Mulyoagung
35	Rianah	Princi, Gading Kulon, Dau
36	Abidah	Desa Sumbersekar, Dau
37	Paimah	Jetis, Mulyoagung
38	Juma'ati	Desa Sumbersekar, Dau

39	Sugiarti	Banjartengah Ds. Sumbersekar Kec. Dau
40	Mistianah	Desa Sumbersekah, Dau
41	Yarni	Desa Sumbersekar Dau
42	Ana	Mbangkon Kec. Karangploso
43	Sri Utami	Desa Sumbersekar Dau
44	Nari	Jetak Ngasri Ds. Mulyoagung Kec. Dau
45	Soleh	Jetak Ngasri Ds. Mulyoagung Kec. Dau
46	Darsono	Jetak Lor Mulyoagung, Dau
47	Farida Nur Aini	Tirto Utomo gang 10 Landungsari
48	Eka Ratna Karlina Putri	Jetis Mulyoagung Dau
49	Moch. Siswoyo	Sengkaling-Mulyoagung
50	Rifa'i	Sengkaling-Mulyoagung
51	Wadi	Jetis, Mulyoagung
52	Farid	Jetis, Mulyoagung
53	Kasianto	Sengkaling-Mulyoagung
54	Sarimin	Jetak Lor, Mulyoagung
55	Yosef	Jetak Lor, Mulyoagung
56	Duriyat	Jetak Lor, Mulyoagung
57	Sarijan	Jetak Lor, Mulyoagung
58	Suroso	Jetak Lor, Mulyoagung
59	Mardi	Jetak Lor, Mulyoagung
60	Supriyono	Jetak Lor, Mulyoagung
61	Jumadi	Sengkaling-Mulyoagung
62	Khoirul	Sengkaling-Mulyoagung
63	Mukhrim	Sengkaling-Mulyoagung
64	Mustikanah	Jetis, Mulyoagung
65	Sujiati	Sengkaling-Mulyoagung
66	Nugraha Wijayanto	Jetis, Mulyoagung
67	Diono	Junrejo, Batu
68	Baina	Jl. Raya Dermo RT 04 RW 01 Dermo Mulyoagung
69	Sumah	Jetis, Mulyoagung
70	Liswati	Princi, Gading Kulon
71	Tatik	Jl. Raya Dermo RT 01 RW 02 Dermo Mulyoagung
72	Sunarsih	Jetis, Mulyoagung
73	Rahman	Princi, Gading Kulon
74	Yusuf	Jl. Raya Dermo RT 01 RW 02 Dermo Mulyoagung
75	Sutini	Banjartengah Desa Sumbersekar
76	Agus	Junrejo, Batu
77	Tumisri	Desa Sumbersekar
78	Heri	Lumajang
79	Tekad	Jl. Mulyodadi RT 01 RW 01 Jetak Lor, Mulyoagung
80	Teguh	Sumpersari Kota Malang
81	Agus	Junrejo, Batu
82	Arif	Junrejo, Batu

*Sumber: Arsip TPST Mulyoagung Bersatu, 2016*

## **2. PEDOMAN WAWANCARA**

### **A. Dengan Pengelola TPST Mulyoagung Bersatu**

1. Profil pengelola TPST Mulyoagung Bersatu desa Mulyoagung?
2. Apa saja bantuan dari pemerintah desa Mulyoagung terkait dengan pemberdayaan melalui pelaksanaan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat?
3. Apakah ada bantuan dari luar pemerintah desa Mulyoagung dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat?
4. Apa saja bantuan yang diberikan?
5. Upaya apa saja yang dilakukan pemerintah desa Mulyoagung agar pelaksanaan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat?
6. Siapa saja aktor yang terlibat dalam upaya pelaksanaan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat ini?
7. Manfaat apa yang diperoleh setelah melaksanakan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat ini?

### **B. Dengan masyarakat Mulyoagung/pekerja TPST Mulyoagung Bersatu**

1. Bagaimana sarana prasarana pada TPST Mulyoagung Bersatu?
2. Berapa lama pelatihan yang diikuti ?
3. Manfaat adanya pemberdayaan dari program pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat?
4. Hasil yang didapat setelah bekerja di TPST Mulyoagung Bersatu.

### 3. DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan pekerja TPST Mulyoagung Bersatu





## Wawancara dengan Bapak Supadi Pengelola TPST Mulyoagung Bersatu



Kondisi TPST Mulyoagung Bersatu



## CURRICULUM VITAE



### I. Identitas Diri

Nama : Resthu Cahyaning Ariani  
Alamat *e-mail* : cahyaningrestu@gmail.com  
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 12 Agustus 1996  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Raya Wonokasih RT 07 RW 08 Desa Gayam  
Kecamatan Gurah, Kediri  
Telepon/HP : 08125980683

### II. Pendidikan Formal

1. SD Negeri Purwoasri II : 2002 – 2008
2. SMP Negeri 1 Purwoasri : 2008 – 2010
3. SMP Negeri 1 Pare : 2010 – 2011
4. SMA Negeri 1 Gurah : 2011 – 2014
5. S1 Fakultas Ilmu Administrasi,  
Universitas Brawijaya Malang : 2014 – 2018

### III. Pengalaman Organisasi dan Kepanitiaan

1. Kepala Departemen Pengembangan Sumber Daya Anggota Sanggar Seni Mahasiswa Tahun 2016
2. Ketua Pelaksana Festawijaya Tahun 2016 Kontingen Fakultas Ilmu Administrasi

### IV. Kemampuan

1. Bahasa Indonesia (Bahasa Nasional)
2. *Microsoft Office* (Skor *Good Grade TRUST Training Partners*)